



Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas pada Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Nonia Sakka Lebang ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
lebangnonia@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Risman Togala
Universitas Sulawesi Tenggara
okrisman23@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lebang, N. S., & Togala, R. (2022). Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas pada Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1-7

Abstrak

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan desa, dimana pemimpin informal sebagai salah satu jenis kepemimpinan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu pembangunan utamanya pembangunan di pedesaan bukan hanya ditentukan oleh adanya peranan dari pemimpin format saja, juga ditentukan adanya pemimpin informal yang mempunyai peranan sangat menunjang keberhasilan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Secara serempak pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja berpengaruh sangat signifikan (high significant) terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kecamatan Konawe Selatan. Hal ini berarti bahwa faktor pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja sangat menentukan sekali terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Secara parsial pengalaman kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sangat ditentukan oleh motivasi, dan pengalaman kerja mereka selama bertugas sebagai kepala desa.

Kata Kunci: Kinerja, Kepala Desa, Tugas.

Abstract

In order to achieve the success of village development, where informal leaders are one type of leadership that cannot be ignored. This is because the success of a development, especially development in rural areas, is not only determined by the role of the format leader, it is also determined by the existence of informal leaders who have a very supportive role in the success of village development. This study aims to determine the performance of the village head in carrying out his duties in Silea Village, Kolono District, South Konawe Regency. From the results of the study, it can be seen that simultaneously education, training, motivation and work experience have a very significant effect on the performance of village heads in carrying out government duties in Silea Village, Kolono District, South Konawe District. This means that the factors of education, training, motivation and work experience are very decisive on the performance of the village head in carrying out government duties in Silea Village, Kolono District, South Konawe Regency. Partially, work experience and motivation have a significant effect on the performance of village heads in carrying out government duties in Silea Village, Kolono District, South Konawe Regency. The performance of village heads in carrying out village government duties in Silea Village, Kolono District, South Konawe Regency is largely determined by their motivation and work experience while serving as village heads..

Keywords: Performance, Village Head, Duties.

A. Pendahuluan

Sasaran pembangunan nasional yang sampai saat ini terus di tingkatkan pelaksanaannya adalah pembangunan masyarakat desa, kemampuan sumber daya manusia Indonesia dapat terus meningkat, termaksud di dalamnya upaya menciptakan iklim yang dapat mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan desa, dimana pemimpin informal sebagai salah satu jenis kepemimpinan yang tidak dapat di abaikan. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu pembangunan utamanya pembangunan di pedesaan bukan hanya ditentukan oleh adanya peranan dari pemimpin format saja, juga ditentukan adanya pemimpin informal yang mempunyai peranan sangat menunjang keberhasilan pembangunan desa.

Berhubung dengan pelaksanaan otonomi daerah, bagi pemerintah desa dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Begitu pula, dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyelenggaraan otonomi desa juga merupakan bagian dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan peran serta pemimpin informal dalam pembangunan.

Demikian pula pemimpin informal di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan telah mampu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat untuk kepentingan public di setiap musyawarah pada pelaksanaan pembangunan desa dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pada dasarnya kinerja kepala desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi biasa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi terhadap mereka. Timbulnya motivasi pada diri seorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhannya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja kepala desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di kabupaten tentu di pengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping faktor motivasi juga factor pengalaman kerja juga sebagai kepala desa akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja)

dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desanya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman di bandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa.

Pada proses kepemimpinan dan pendekatan aspek berupa aktivitas sebagai upaya, pemimpin dalam rangka menjalankan aktivitas sebagai organisasi atau lembaga yang dibawahinya, sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat optimal. Untuk pencapaian proses tujuan dan sasaran organisasi membutuhkan peran aktif pemimpin dalam menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi

Berdasarkan uraian permasalahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas Pada Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kantor Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pemerintah desa pada Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Untuk keperluan data frekwensi diperlukan kegiatan penetapan sample, maka pengambil sample dalam kegiatan ini berdasarkan metode pengambilan sample yang tidak diacak yaitu purposive sampling.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di kantor Desa dan para tokoh Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 14 orang..

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu : cara memperoleh data dengan mempelajari literatur-literatur, laporan-laporan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan teknik:
 - a. Observasi yaitu pengamatan terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan mempergunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini dilakukan agar dapat menjaring informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

Letak Geografis

Keadaan lokasi penelitian Kabupaten Konawe Selatan dengan Ibukota Wanggudu merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis Kabupaten Konawe Selatan terletak di bagian Utara khatulistiwa, melintang dari Utara ke Utara antara 02°97' dan 03°86' lintang Utara, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan yaitu 500.339 ha atau 13,38 persen dari luas wilayah Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk Perairan Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe) ±11.960 km² atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Kolono, Lembo, Lasolo, Molawe, Asera, Langgikima dan Wiwirano. Sebagaimana yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di desa Silea merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di Kecamatan Kolono

Iklm Tropis

Kondisi iklim di desa Silea tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya, yaitu memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik.

Demografi

Berdasarkan hasil rekapitulasi data penduduk pada bulan September, 2020 jumlah penduduk Desa Silea adalah 1.473 Jiwa, 427 Kepala keluarga yang terdiri dari laki-laki sejumlah 803 orang dan perempuan 670 orang.

Keadaan Sosial Budaya

penduduk yang ada di desa Silea sebagian mengannut agama islam sebanyak 825 orang (laki-laki) dan 646 orang (perempuan) dan Kristen 2 orang (laki-laki). Selanjutnya, mata pencaharian yang paling menonjol adalah nelayan sebanyak 310 orang (laki-laki) dan 391 orang (perempuan) dari jumlah keseluruhan penduduk ekonomi produktif, kemudian mata pencaharian sebagai PNS sebanyak 13 orang (laki-laki) dan 2 orang (perempuan), mata pencaharian sebagai Pedagang sebanyak 32 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, mata pencaharian sebagai Buruh Tani sebanyak 150 orang (laki-laki) dan 129 orang perempuan, mata pencaharian sebagai Montir sebanyak 4 orang (laki-laki) dan mata pencaharian sebagai Pengusaha kecil dan Menengah sebanyak 19 orang (laki-laki).

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi perkembangan maju mundurnya suatu desa adalah factor pendidikan. Desa Silea yang sementara, membenahi diri dalam memacu berbagai ketinggalan memerlukan manusia yang berkualitas, untuk mendapatkan manusia yang berkualitas. Harus melalui pendidikan, dalam hal ini pemerintah harus mempunyai peran besar di bidang pendidikan peningkatan sumberdaya manusia, baik melalui pendidikan farmasi maupun informal. Penduduk yang berpendidikan tidak tamat SD sebanyak 155 orang, Tamat SD/ Sederajat sebanyak 458 orang, yang tamat SLTP/ sederajat sebanyak 389 orang, tamat SLTA sebanyak 189 orang, tamat starata 1 sebanyak 27 orang.

2. Karasteristik Responden

Karasteristik responden berdasarkan usia

Karasteristik responden berdasarkan usia bahwa usia responden yang menjabat sebagai kepala desa paling dominan adalah berusia 36-40 tahun sebanyak 3 orang (21,34%), yang berusia 25-30 tahun sebanyak 2 orang (14,23%), yang berusia 31-35 tahun sebanyak 2 orang (14,21%), yang berusia 41-45 tahun sebanyak 2 orang (14,23%), yang berusia 46-50 tahun hanya 1 orang (7,14%), yang berusia 51-55 tahun sebanyak 2 orang (14,23%), dan yang berusia 56-60 tahun 2 orang (14,23%).

Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan tingkat usia, jabatan kepada desa di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan telah dipercayakan kepada orang-orang yang berusia dewasa, sehingga diharapkan kinerja mereka memimpin pemerintahan desa dan membangun daerahnya dapat lebih optimal.

Karasteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Karasteristik responden berdasarkan jenis kelamin bahwa responden yang menjabat di kantor desa Silea lebih dominan yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 11 orang (78,57%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang (21,43%).

Karasteristik responden berdasarkan Status Pernikahan

Karasteristik responden berdasarkan Status Pernikahan bahwa seluruh responden yang menjabat di kantor desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sudah menikah, sehingga mereka diharapkan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memimpin dan membangun daerah atau desa yang telah diamanatkan masyarakat yang telah memilih mereka sebagai kepala desa dan staf lainnya

Karasteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Karasteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan bahwa responden yang menjabat di kantor Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan lebih dominan yang memiliki latar belakang berpendidikan tamat SLTA sebanyak 12 orang (85,71%),

sedangkan yang berlatar belakang berpendidikan Strata 1 sebanyak 1 orang (7,14%). Disamping itu masih ada di kantor desa Silea yang memiliki latar belakang berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang (7,14%).

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai di kantor desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat dikatakan belumlah memadai untuk memimpin pemerintahan desa karena melihat situasi dan kondisi sosial, ekonomi serta persoalan yang terjadi di masyarakat pada saat ini sangat kompleks, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka agar dapat bekerja secara optimal di dalam memimpin pemerintahan desa yang telah diamanatkan oleh masyarakat

Karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja bahwa responden yang menjabat di kantor desa Silea Kecamatan Lalembuu Kecamatan Konawe Selatan lebih dominan mereka yang memiliki masa kerja lebih 15 tahun sebanyak 5 orang (35,71%), sedangkan yang memiliki masa kerja dari 11 tahun samapi dengan 15 tahun sebanyak 3 orang (32,43%), yang memiliki masa kerja 6 tahun sampai 10 tahun sebanyak 4 orang (28,57%) dan yang memiliki masa kerja 1 tahun sampai 5 tahun sebanyak 2 orang (14,29%).

3. Penjelasan Responden Atas Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Penjelasan Responden atas Variabel Pendidikan

Penjelasan Responden atas Variabel Pendidikan Indikator dan variabel pendidikan adalah pendidikan yang dimiliki kepala desa dan staf lainnya, keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, respon pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan pegawai dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Penjelasan responden untuk masing-masing indikator dari variabel pendidikan adalah sebagian besar dari responden atau sebanyak 42,2% menjawab bahwa pendidikan yang dimiliki mereka sangat mendukung sekali dalam menjalankan tugas sebagai pegawai kantor desa, karena dengan pendidikan yang dimiliki akan dapat menunjang keberhasilan dalam menjalankan program pembangunan desa.

Penjelasan responden mengenai kegiatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebanyak 34,4% menjawab bahwa sangat setuju sekali, karena sebagian besar dari responden keinginan agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya agar dapat menjalankan tugas-tugasnya selaku pegawai kantor desa lebih baik serta dapat meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Penjelasan responden mengenai responden Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk meningkatkan pendidikan pegawai kantor desa sebagian besar dari responden atau 42,2% menjawab tidak baik, karena selama ini Pemerintah desa tidak ada melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan pegawai kantor desa. Hal ini dibuktikan karena masih ada pegawai yang hanya memiliki tingkat pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Penjelasan responden mengenai upaya pemerintah desa untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pegawai lainnya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebanyak 31,3% menjawab tidak baik, karena selama mereka menjabat kepala desa dan pegawai/staf tidak ada upaya yang telah dilakukan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mereka yang melanjutkan biaya pendidikannya.

Penjelasan Responden atas Variabel Pelatihan

Indikator dari variabel penelitian adalah kebutuhan akan pelatihan, kesempatan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan, kesesuaian materi pelatihan dan kesesuaian metode pelatihan.

Penjelasan responden untuk masing-masing indikator dan variabel pelatihan adalah sebagian besar dari responden atau sebanyak 42,2% menjawab sangat penting sekali pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Desa Silea kepada pegawai/staf karena sangat membantu kepala desa dalam melaksanakan administrasi di pemerintahan desa.

Penjelasan responden mengenai kesempatan yang diberikan pelatihan sebanyak 40,6% menjawab setuju, karena sebagian besar dari responden memberikan alasan bahwa selama mereka menjabat selaku ataf dan paegawai, pemerintah Desa Silea selalu memberikan

kesempatan kepada setiap kepala desa untuk dapat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Penjelasan responden mengenai kesesuaian materi pelatihan pada setiap pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 57,8% menjawab setuju, karena sebagian besar dari responden memberikan alasan bahwa pada umumnya materi yang diberikan pada setiap pelatihan dapat mereka gunakan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Penjelasan responden mengenai metode pelatihan yang digunakan pada setiap pelatihan sebanyak 48,4% menjawab setuju, karena sebagian besar dari responden memberikan alasan bahwa pada umumnya metode penelitian yang digunakan pada setiap pelatihan dapat membantu mereka untuk lebih dapat memahami materi yang diberikan pada setiap pelatihan, sehingga setiap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dapat lebih ditingkatkan partisipasinya.

Penjelasan Responden atas Variabel Motivasi

Indikator dan variabel motivasi adalah memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kegiatan untuk berprestasi dan memiliki semangat dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Penjelasan responden untuk masing-masing indikator dari variabel motivasi adalah sebagian besar dari responden atau sebanyak 37,5% menjawab bahwa sangat diperlukan tanggung jawab pribadi yang tinggi pada setiap kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.

Penjelasan responden mengenai pentingnya kepala desa memiliki semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku kepala desa sebanyak 32,8% menjawab penting karena semangat kerja yang tinggi perlu dimiliki oleh setiap kepala desa agar tugas dan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka supaya dapat dilaksanakan dengan baik.

Penjelasan responden mengenai keinginan yang ada dalam diri kepala desa untuk berprestasi sebanyak 40,6% menjawab sangat penting karena selalu berupaya agar setiap tugas dan rencana kerja yang telah ditargetkan pemerintah daerah harus dapat dilaksanakan dengan hasil yang terbaik. Penjelasan responden mengenai perlunya setiap kepala desa memiliki semangat dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebanyak 32,8% menjawab perlu, agar program kerja ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap kepala desa.

Penjelasan Responden atas Variabel Pengalaman Kerja

Indikator dan variabel pengalaman kerja adalah lamanya masa kerja sebagai kepala desa, memil memimpin bawahan, memiliki pengalaman sebagai aparatur pemerintahan, dan memiliki pengalaman dalam bidang administrasi.

Penjelasan responden mengenai masa kerja yang dimiliki sangat membantu tugas dan pekerjaan selaku kepala desa sebanyak 56,3% menjawab setuju karena apabila seseorang yang memangku jabatan belum cukup lama akan mengakibatkan seseorang itu belum mengenal dan menghayati pekerjaan yang diembannya.

Penjelasan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam memimpin bawahannya sebanyak 67,2% menjawab setuju karena kemampuan dalam memimpin bawahan sangat mendukung keberhasilan seseorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Penjelasan responden mengenai pengalaman sebagai aparatur pemerintahan sebanyak 46,9% menjawab tidak setuju karena sebagian besar kepala desa yang terpilih adalah berasal dari pemilihan langsung oleh rakyat dan bukan berasal dari kalangan aparatur pemerintahan.

Penjelasan responden mengenai pengalaman yang dimiliki dalam bidang administrasi sebagai kepala desa sebanyak 35,9% menjawab setuju karena seseorang kepala desa yang terpilih agar dapat menjalankan tugas dan pekerjaan yang baik.

Penjelasan Responden atas Variabel Kerja

Indikator dari variabel kinerja adalah tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kejujuran, praarsa/inisiatif dan kepemimpinan. Penjelasan responden mengenai tanggung jawab sebanyak 56,3% menjawab setuju karena selaku kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas selaku kepala desa.

Penjelasan responden mengenai disiplin yang harus dimiliki kepala desa sebanyak 45,3% menjawab setuju karena seseorang kepala desa harus mampu bertindak tegas dan tidak memihak dalam setiap pengambilan keputusan.

Penjelasan responden mengenai pentingnya kerjasama yang harus dilakukan seseorang kepala desa dengan seluruh pihak yang sangat terkait dengan tugas dan pekerjaannya sebanyak 43,8% menjawab sangat setuju sekali karena didukung dari segala pihak, khususnya masyarakat sangat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan kepala desa melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Penjelasan responden mengenai pentingnya kejujuran yang ada dalam diri seseorang kepala desa sebanyak 56,3% menjawab setuju karena seseorang yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan dengan perilaku ikhlas dan tidak menyalahgunakan wewenangannya dalam menjalankan tugasnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Secara serempak pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja berpengaruh sangat signifikan (high significant) terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kecamatan Konawe Selatan. Hal ini berarti bahwa faktor pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja sangat menentukan sekali terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

Secara parsial pengalaman kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

Kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa di Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sangat ditentukan oleh motivasi, dan pengalaman kerja mereka selama bertugas sebagai kepala desa.

E. Referensi

- Ahmad, S. B. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gibson, J. L., Jhon M., Ivancevich dan James H., Donnelly, Jr., (2008). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses Edisi keempat*. Jakarta: Erlangga
- Hamalik, O. (2006). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. A. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2001). *Metodologi Penelitian, cet. II*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Soeprihanto, J. (2001). *Penilaian kinerja dan pengembangan karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suprihatini, A. (2009). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Sutoro, E. (2005). *Desentralisasi dan Pembangunan Desa*. *Jawa Pos, Surabaya*, 12 September 2005.
- Wijaya, A. (2000). *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju emokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Aktivitas Ekonomi Wanita Pekerja di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Jawiah ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
sjawiah7@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Abdul Nashar
Universitas Sulawesi Tenggara
abdulnashar99@yahoo.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Jawiah, S., & Nashar, A. (2022). Aktivitas Ekonomi Wanita Pekerja di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 8-16.

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah mengetahui (a) aktivitas ekonomi wanita, dan (b) faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat aktivitas ekonomi perempuan pekerja di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan : a. Perempuan pekerja di Kecamatan Tinanggea berasal dari rumah tangga petani dengan anggota rumah tangga yang besar dengan pendapatan dari usaha tani yang rendah. b. Aktivitas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan adalah sebagai buruh perkebunan, usaha tani keluarga dan pegawai. Namun paling banyak diantara mereka itu adalah sebagai buruh perkebunan, dan c. Tingkat aktivitas kegiatan ekonomi mereka bervariasi dengan terbanyak pada tingkat aktivitas yang sangat aktif..

Kata Kunci: aktifitas, ekonomi, bervariasi.

Abstract

The objectives to be achieved in this research are to find out (a) the economic activity of women, and (b) the factors related to the level of economic activity of women workers in Tinanggea District, South Konawe Regency. The research method uses descriptive. The results showed: a. Women workers in Tinanggea sub-district come from farming households with large household members with low income from farming. b. Their economic activities are as plantation workers, family farm workers and employees. However, most of them are plantation workers, and c. The level of activity of their economic activity varies with the most at the level of very active activity.

Keywords: activity, economy, varied.

A. Pendahuluan

Problematika rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman yang sulit tersentuh oleh pembangunan dan pembaharuan. Banyak kalangan menduga rendahnya sumber daya kaum perempuan di Indonesia terjadi akibat ketidakadilan gender, sistem sosial budaya tradisional yang lebih banyak berpihak pada kaum laki-laki, serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kaum laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan. Hal ini tentu saja mengakibatkan sebagian kaum perempuan menjadi marginal dan dieksploitasi oleh kaum laki-laki.

Sangat menarik untuk dicermati, meskipun secara normatif tidak ada diskriminasi terhadap perempuan di dalam proses pembangunan, pada kenyataannya kelompok masyarakat yang mengisi lebih dari separoh warga Negara ini telah tertinggal. Pokok persoalannya adalah karena kepentingan mereka (kaum perempuan) telah terabaikan. Hal ini tercermin secara jelas dari pengalaman intensifikasi sektor pertanian tahun 70-an yang dilakukan tanpa memperhitungkan peran kaum perempuan. Intensifikasi yang dikemas dalam ideologi modernisasi telah menyingkirkan kaum perempuan dari pertanian.

Dominasi perempuan dalam pertanian subsisten telah digeser oleh masuknya modal. Akibatnya perempuan terlempar ke feri-feri dan sektor non-pertanian. Dan semakin menjadi masalah, ketika sektor non-pertanian ternyata belum cukup siap menampung mereka karena berbagai kendala eksternal maupun internal yang inheren. Seperti halnya program pembinaan generasi muda, program peningkatan peranan wanita inipun merupakan program koordinatif dengan instansi lain di bawah koordinasi Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita.

Latar belakang wanita bekerja dalam rumah tangga berawal dari banyak kenutuhan yang harus di penuhi, membuat sadar akan pentingnya kerja bagi setiap individu, baik wanita atau laki-laki. Problematika ekonomi rumah tangga sering kali menuntut agar wanita ikut bekerja dalam mencukupi kebutuhan. Sehingga antara suami dan istri yang bekerja dalam hal ini terdapat relasi-relasi formal semacam pembagian kerja (*division of labour*), dimana suami bertindak sebagai pencari nafkah dan istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, namun ancap kali istri berperan sebagai pencari nafkah. Sehingga dalam pengurusan rumah tangga demikian ini yang sangat penting adalah faktor kemampuan membagi waktu dan tenaga untuk melaksanakan berbagai macam tugas pekerjaan di rumah, dari waktu subuh sampai larut malam.

Tentunya semua itu harus dikerjakan dengan baik oleh seorang wanita. Ilustrasi semacam itulah yang diperankan oleh wanita pekerja. Sebenarnya tidak hanya dari problematika ekonomi saja.

Mery Astuti mengemukakan bahwa perempuan sebagai salah satu asset pembangunan belum sepenuhnya dihargai potensinya. Perempuan sebagai pihak tuna kuasa masih mendapat perlakuan yang sangat tidak adil, oleh karena berkaitan dengan fungsi reproduksinya, maka tempat perempuan lebih diarahkan pada posisi domestik pengaturan rumah tangga dengan, kegiatan-kegiatan non ekonomi, dan walaupun terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mendatangkan penghasilan, maka mereka seringkali ditempatkan pada posisi pekerjaan dan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki pada umumnya menempati jenis pekerjaan yang stabil, mendapat upah yang lebih tinggi, peluang untuk naik posisi sangat terbuka dan dikategorikan sebagai pekerja terampil. Sedangkan perempuan umumnya menempati jenis-jenis pekerjaan yang kurang stabil, upah yang lebih rendah, peluang untuk naik posisi sangat terbatas, serta dikategorikan sebagai pekerja tidak terampil. Bahkan acapkali keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi karena adanya tekanan ekonomi rumah tangga mereka (Saptari, 1989).

Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak sedikit kita dijumpai perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan perempuan tidak lagi hanya kegiatan domestikasi yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Namun faktor apa yang mempengaruhi mereka (perempuan) melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan domestik belum diketahui. Berdasarkan uraian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aktivitas ekonomi perempuan pekerja di kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perempuan pekerja yang berdomisili pada 25 desa/kelurahan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Tinanggea. Mengingat besarnya jumlah populasi dan luasnya wilayah penelitian, maka diadakan penarikan sampel sebagai berikut: Pertama, memilih dan menetapkan 3 (tiga) desa/kelurahan sebagai desa sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive (bertujuan). Adapun desa yang dipilih tersebut adalah desa/ kelurahan yang memiliki banyak penduduk berjenis kelamin perempuan yang melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil pengamatan desa/kelurahan yang kelihatan demikian itu adalah (1) Roraya; (2) Bungin Permai; dan (3) Lapulu; Kedua, dilakukan survei untuk mengetahui jumlah populasi pada masing-masing desa sampel. Dari hasil survei diketahui jumlah populasi dari ketiga desa sampel sebanyak 242 orang. Kemudian dengan memperhatikan jumlah populasi setiap desa, maka populasi yang telah tercatat tersebut ditarik sampel secara acak sederhana masing-masing sekitar 40 persen dari populasi. Dengan demikian jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 97 orang responden.

Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

- a. Study Kepustakaan (Library Study) yakni mengumpulkan data-data dengan cara membaca, menelaah dokumen, dan menguji data-data hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tulisan ini.
- b. Study Lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung di lapangan, yang digunakan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :
 1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan terpilih,
 2. Quesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan terstruktur dan diedarkan kepada para responden,
 3. Dokumentasi yaitu mencatat dokumen berupa bahan/laporan yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu semua sumber data yang diperoleh di lapangan mengumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan Geografis

Secara astronomis Konawe Selatan terletak antara 30.58.56' dan 4.031.52' lintang Selatan, dan antara 121.58' dan 123.16' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Konawe Selatan memiliki batasbatas: Utara-Konawe dan Kota Kendari; Timur-Laut Banda dan Laut Maluku; Selatan-Bombana dan Muna; Barat-Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 terdiri atas 25 Kecamatan yaitu Tinanggea, Lalembuu, Tinanggea , Buke, Tinanggea Barat, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Lainea, Laeya, Kolono, Kolono Timur, Laonti, Tinanggea , Tinanggea Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Tinanggea , Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua dan Basala. Selain terdapat di jazirah Sulawesi, Wilayah Kabupaten Konawe Selatan juga terletak di Pulau Hari dan Pulau Cempedak.

Secara astronomis, Kecamatan Tinanggea terletak antara 04°46'44.1" Lintang Selatan dan 122°19'73.1" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tinanggea memiliki batas - batas wilayah yaitu: Kabupaten Bombana, Kec. Tinanggea , Kec. Tinanggea Barat, Kec. Lalembuu, Kec. Tinanggea dan Selat Tiworo.

Kecamatan Tinanggea terdiri dari 22 desa, 2 Kelurahan dan 1 desa persiapan. Dapat dilihat bahwa, Desa Tatangge memiliki wilayah terluas yakni 91,24 km², sedangkan Desa Torokeku memiliki wilayah terkecil yang hanya seluas 2,15 km²

Keadaan Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Tinanggea berjumlah 24.514, yang terdiri dari 12.052 penduduk perempuan dan 12.462 penduduk laki-laki. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24.168 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk

Kecamatan Tinanggea pada tahun 2017 sebesar 1,43 %, lebih rendah dibanding pertumbuhan penduduk tahun 2016 yaitu sebesar 1,55 %.

Kepadatan penduduk Kecamatan Tinanggea mengalami peningkatan dari 68 jiwa perkilometer persegi tahun 2016 menjadi 69 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2017. Tatangge merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sedangkan Tinanggea adalah desa terpadat penduduknya.

Wilayah administrasi Kecamatan Tinanggea tahun 2017 terdiri atas 22 desa definitif, 2 Kelurahan dan 1 desa persiapan, dengan ibukotanya adalah Kelurahan Tinanggea. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Tinanggea sebanyak 21 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. PNS terbanyak golongan III, yaitu sebanyak 13 orang PNS. Di kantor Kecamatan/sekretariat terdapat 21 orang PNS, jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan terdapat 7 orang PNS yang bergolongan II, 13 orang PNS yang bergolongan III, dan 1 orang bergolongan IV. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 7 PNS yang lulusan SLTA, 13 PNS yang lulusan S1 dan 1 PNS lulusan S2.

Karakteristik Responden

Pertama, Usia Responden. Usia seseorang mempengaruhi kemampuan fisik dan kematangan mentalnya. Seseorang yang berusia muda memiliki kemampuan kerja fisik yang relatif lebih unggul daripada yang berusia tua. Sebaliknya, seseorang yang berusia lebih tua akan memiliki kematangan mental yang relatif lebih baik dibandingkan mereka yang lebih muda. Dengan demikian, baik yang berusia muda maupun yang berusia tua masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

Data hasil survei tentang usia responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Presentase
1.	29 ke bawah	44	45,4
2.	30 – 39	30	30,9
3.	40 ke atas	23	23,7
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi tertinggi (45,4 persen) perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi adalah pada kelompok usia 29 tahun ke bawah, kemudian menurun seiring dengan bertambahnya usia.

Tabel di atas memberi penjelasan bahwa semakin tua usia perempuan semakin kurang pula diantara mereka yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Bila keadaan ini dikaitkan dengan keadaan fisik seseorang dalam usia muda, maka banyak diantara perempuan yang berusia muda yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi dapat dipahami, sebab mereka dalam melakukan aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan adanya kondisi fisik yang kuat.

Kedua, Tingkat Pendidikan Responden. Mengenai tingkat pendidikan perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak/tamat SD	51	52,6
2.	Pernah/tamat STP	33	34,0
3.	Tamat SMU/K ke atas	13	13,4
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa paling banyak (52,6 persen) perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi tidak/tamat Sekolah Dasar. Sedangkan yang sempat menikmati Sekolah lanjutan Tingkat Pertama termasuk juga yang tamat sebesar 34 persen, dan hanya sebagian kecil dari mereka, sempat menikmati Sekolah Menengah Umum/Kejuruan hingga tamat, yakni sekitar 13,4 persen.

Dari tabel itu dapat dikatakan bahwa perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Bahkan kalau digunakan wajib belajar sembilan tahun, dimana yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah SD dan SLTP, maka tidak sampai 14 persen dari mereka itu yang melewati pendidikan dasar.

Ketiga, Status Perkawinan Responden. Perempuan yang telah menikah memiliki suami dan kemungkinan pula telah memiliki anak akan lebih banyak tersita waktunya untuk kegiatan-kegiatan domestik (kerumahtanggaan) dibandingkan perempuan yang belum menikah. Demikian pula perempuan yang berstatus janda yang sekaligus selaku kepala rumah tangga juga akan banyak tersita waktunya untuk kegiatan domestik. Lain halnya jika mereka itu menumpang di rumah orang tua. Data mengenai status kawin responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Status Kawin

No.	Status Kawin	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak/belum menikah	4	24,7
2.	Nikah	67	69,1
3.	Janda	6	6,2
Jumlah		97	100,00

Sumber: Survei Lapangan, Maret 2022

Data tabel di atas menggambarkan bahwa paling banyak (69,1 persen) perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi adalah mereka yang telah menikah. Sedangkan yang telah/pernah menikah namun telah bercerai sebanyak 6,2 persen, dan yang tidak/belum menikah sebanyak 24,7 persen.

Secara logis perempuan yang belum menikah tentu lebih rendah tingkat aktivitas kegiatannya yang bersifat domestik daripada yang telah menikah, sehingga diduga memiliki tingkat aktivitas kegiatan ekonomi lebih tinggi pula.

Keempat, Kondisi Rumah Tangga Responden. Dalam penelitian ini, deskripsi kondisi rumah tangga responden dibatasi hanya menyangkut besarnya atau banyaknya anggota rumah tangga dan pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan yang dilakukan oleh responden.

Berikut ini diuraikan secara berturut-turut kedua hal tersebut.

a. Besaran Rumah Tangga Responden

Besaran rumah tangga responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Besaran Rumah Tangga (Jiwa)

No.	Banyaknya anggota RT	Frekuensi	Presentase
1.	< 5	17	17,5
2.	5 - 7	59	60,8
3.	> 7	21	21,7
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa proporsi yang paling tinggi (60,8 persen) dari perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi adalah mereka yang mempunyai besaran rumah tangga antara 5 - 7 orang. Kemudian disusul mereka yang memiliki besaran rumah tangga 8 orang ke atas sebanyak 21,7 persen, dan proporsi yang paling rendah adalah mereka yang berada pada rumah tangga yang berpenghuni kurang dari 5 orang sebanyak 17,5 persen.

Dapat pula dijelaskan bahwa ternyata rumah tangga responden tergolong besar. Hal ini terjadi karena hampir semua rumah tangga responden ada penghuninya yang bukan tergolong keluarga inti (ayah, ibu dan anak), tapi masih tergolong keluarga responden.

b. Pelaksanaan Tugas-Tugas Domestik

Secara garis besarnya tugas-tugas domestik/ kerumah-tanggaan perempuan adalah tugas-tugas yang dilakukan di dalam rumah yang mencakup (1) memasak makanan/menyiapkan makanan dalam pengertian mengolah bahan pangan menjadi pangan yang siap dikonsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga, (2) mencuci piring, (3) mencuci pakaian; dan (4) membersihkan dan mengatur rumah dan perabotnya; serta (5) mengurus anak. Keempat tugas kerumahtanggaan ini dianggap sebagai tugas mendasar, dan umumnya (kalau tidak keseluruhan) perempuanlah yang senantiasa diberi peran sebagai penanggung jawab dari aktivitas-aktivitas tersebut.

Mengenai pelaksanaan tugas domestik tersebut pada perempuan yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi disajikan pada tabel berikut

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Tugas Domestik

Jenis tugas domestik	Pelaksanaan tugas			Jumlah
	Sendiri	Dibantu	Tidak melaksanakan	
Memasak makanan	32 (33,0)	61 (62,9)	4 (4,1)	97 (100,0)
Mencuci piring	38 (39,2)	43 (44,3)	16 (16,5)	97 (100,0)
Mencuci pakaian	42 (43,3)	34 (35,1)	21 (21,6)	97 (100,0)
Mengurus rumah	23 (23,7)	74 (76,3)	0 (0,0)	97 (100,0)
Mengurus anak	25(25,8)	48 (49,5)	24 (24,7)	97 (100,0)

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data pada tabel di atas tersebut bahwa kurang dari setengah jumlah responden yang melaksanakan tugas kerumahtanggaan melakukannya sendiri dalam arti tidak dibantu oleh anggota rumah tangga lainnya, bahkan ada diantara mereka yang menjawab bebas dari pekerjaan kerumahtanggaan. Dengan demikian sebagai besar responden memiliki waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan domestik.

Kelima, Penghasilan Rumah Tangga Responden. Penghasilan rumah tangga responden yang dimaksud disini adalah penghasilan yang diperoleh seluruh anggota rumah tangga dari usaha tani. Dibatasinya penghasilan rumah tangga hanya yang bersumber dari usaha tani karena pokok penekanan yang ingin diketahui adalah apakah karena kondisi ekonomi rumah tangga rendah sehingga perempuan pekerja harus melakukan aktivitas kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kondisi ekonomi rumah tangganya; bukan persoalan apakah dengan tingkat aktivitas kegiatan ekonomi perempuan pekerja yang tinggi mengakibatkan penghasilan rumah tangganya tinggi pula.

Untuk mengetahui penghasilan rumah tangga responden dari usaha tani, maka terlebih dahulu dideskripsikan mengenai luas lahan yang diolah/digarap rumah tangga responden. Hal ini dilakukan karena penghasilan dari usaha tani sangat dipengaruhi oleh luas lahan yang mereka usahakan secara produktif. Secara teoritis, semakin luas lahan yang mereka usahakan secara produktif semakin besar pula penghasilan yang mereka peroleh.

Untuk melihat luas lahan yang diusahakan secara produktif oleh rumah tangga perempuan pekerja yang menjadi responden dalam penelitian ini, maka data hasil survei tentang hal itu disajikan pada tabel 6. Data pada tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi (52,6 persen) responden yang rumah tangganya mengusahakan lahan antara 1,1 - 2,0 hektar. Kemudian yang mengusahakan lahan lebih dari 2,0 hektar sebesar 28,9 persen, dan rumah tangga yang mengusahakan lahan 1,0 hektar kebawah sebanyak 18,5 persen.

Tabel 6. Luas Lahan yang Diusahakan oleh Rumah Tangga Responden (Hektar)

No.	Luas Lahan	Frekuensi	Presentase
1.	< 1.1	18	18,5
2.	1.1 - 2.0	51	52,6
3.	> 2.0	28	28,9
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Dalam penelitian ini pula diketahui bahwa lahan olahan responden sebagaimana disajikan pada tabel di atas juga sekaligus merupakan lahan milik. Tidak ditemukan satupun dari 97 responden yang rumah tangganya mengolah lahan (sebagian ataupun keseluruhan luas lahan) hanya merupakan lahan garapan/lahan bagi hasil.

Adapun penghasilan rumah tangga dari usaha tani dari perempuan pekerja yang menjadi responden dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 7. Data pada tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi (51,5 persen) rumah tangga responden berpenghasilan antara Rp.401.000 - Rp.550.000 /bulan. Kemudian secara berturut-turut, rumah tangga yang berpenghasilan Rp,550.000/bulan ke atas sebesar 26,8 persen dan rumah tangga yang berpenghasilan Rp,400.000/bulan ke bawah sebanyak 21,7

Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Penghasilan Rumah Tangga dari Usaha Tani (Ribuan rupiah/bulan)

No.	Jumlah Penghasilan	Frekuensi	Presentase
1.	< 401,00	21	21,7
2.	401,00 - 550,00	50	51,5

No.	Jumlah Penghasilan	Frekuensi	Presentase
3.	> 550,00	26	26,8
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Aktivitas Kegiatan Ekonomi Responden

Sebagaimana dikemukakan pada bagian metodologi bahwa untuk mengukur tingkat aktivitas kegiatan ekonomi perempuan pekerja digunakan tiga indikator yaitu : (1) status pekerjaan; (2) intensitas kerja; dan (3) curahan waktu kerja. Ketiga indikator aktifitas kegiatan ekonomi ini dideskripsikan berikut ini.

a. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dimaksudkan adalah bagaimana pekerjaan tersebut dikerjakan. Status pekerjaan pada dasarnya merupakan cermin tentang bagaimana tingkat beratnya suatu pekerjaan. Dalam Susenas 1995 misalnya status pekerjaan dari pekerjaan paling ringan sampai yang paling berat, yakni dari pekerja keluarga hingga bekerja dengan berusaha sendiri.

Data tentang status pekerjaan responden dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	Skor	Frekuensi	Presentase
Pekerja Keluarga	1	16	16,5
Buruh	3	72	74,2
Berusaha/Bekerja Sendiri	5	9	9,3
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (74,2 persen) perempuan pekerja memiliki status pekerjaan sebagai buruh. Kemudian perempuan dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga sebesar 16,5 persen, dan yang terkecil adalah responden yang status pekerjaannya adalah bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain yaitu 9,3 persen dari total 97 responden.

b. Intensitas Kerja

Intensitas kerja dimaksudkan adalah jumlah hari yang digunakan responden untuk melakukan aktifitas kegiatan ekonomi dalam 6 bulan terakhir. Data mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Enam Bulan Terakhir (dalam hari)

Jumlah Hari Kerja	Skor	Frekuensi	Presentase
< 36	1	12	12,4
37 - 72	3	19	19,6
> 72	5	66	68,0
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data pada tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase terkecil (12,4 persen) responden adalah mereka yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi rata-rata 6 (enam) hari perbulan dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan mereka yang menggunakan rata-rata antara 7 - 12 hari kerja/bulan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebesar 19,6 persen. Kemudian persentase responden yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi lebih dari rata-rata 12 hari/bulan dalam 6 bulan terakhir sebanyak 68,0 persen.

c. Curahan Waktu

Curahan waktu yang dimaksudkan disini adalah rata-rata jumlah jam dalam sehari yang digunakan responden untuk melakukan aktifitas kegiatan ekonomi. Data mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Distribusi Responden Menurut Rata-rata Jumlah Jam Kerja/Hari

Rata-rata Jumlah Jam Kerja	Skor	Frekuensi	Presentase
< 6,0	1	7	7,2

Rata-rata Jumlah Jam Kerja	Skor	Frekuensi	Presentase
6,0 – 7,0	3	19	19,6
> 7,0	5	71	73,2
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data pada tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase terkecil (7,2 persen) responden adalah mereka yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi rata-rata kurang dari 6 jam dalam sehari. Sedangkan mereka yang menggunakan rata-rata kisaran 6,0 - 7,0 jam/hari sebesar 19,6 persen. Kemudian persentase responden terbesar adalah mereka yang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi rata-rata lebih dari 7,0/hari sebanyak 73,2 persen.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian metode penelitian bahwa untuk mengetahui bagaimana tingkat aktivitas kegiatan ekonomi perempuan pekerja dilakukan dengan melihat nilai rata-rata skor ketiga indikator tersebut di atas yang diperoleh setiap responden.

Hasil rata-rata skor dikelompokkan ke dalam tiga taraf tingkatan aktivitas kegiatan ekonomi. Ketiga klasifikasi tersebut adalah (1) aktivitas kegiatan ekonomi bertaraf "sangat aktif", adalah responden yang mencapai rata-rata skor di atas 11,0 ; (2) aktivitas kegiatan ekonomi bertaraf "aktif", adalah responden yang mencapai rata-rata skor antar 7,1 - 11,0; dan (3) aktivitas kegiatan ekonomi bertaraf "kurang aktif", adalah responden yang hanya rata-rata skor pencapaiannya 7,0 ke bawah. Pengelompokan responden sebagaimana dimaksud ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Tingkat Aktivitas Kegiatan Ekonomi

Tingkat Aktivitas	Skor	Frekuensi	Presentase
Sangat aktif	> 11,0	46	47,4
Aktif	7,1 – 11,0	27	38,2
Kurang aktif	< 7,1	14	14,4
Jumlah		97	100,00

Sumber : Survei Lapangan, Maret 2022

Data tabel di atas menunjukkan ada sebanyak 46 (47,4 persen) responden yang aktivitas kegiatan ekonominya bertaraf sangat aktif. Kemudian 27 responden bertaraf melakukan aktivitas kegiatan ekonomi bertaraf aktif dan hanya 14 responden tingkat aktivitas kegiatan ekonominya bertaraf kurang aktif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian sebagaimana dideskripsikan pada bagian di muka dalam tulisan ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan pekerja di Kecamatan Tinanggea berasal dari rumah tangga tani dengan anggota rumah tangga yang besar dengan pendapatan dari usaha tani yang rendah.
2. Pendidikan mereka pada umumnya rendah malah lebih banyak diantara mereka yang hanya berpendidikan sampai sekolah dasar dengan usia yang masih tergolong mudah yaitu paling banyak diantara mereka berusia 29 tahun ke bawah.
3. Aktivitas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan adalah sebagai buruh perkebunan, usaha tani keluarga dan pegawai. Namun paling banyak diantara mereka itu adalah sebagai buruh perkebunan.
4. Tingkat aktivitas kegiatan ekonomi mereka bervariasi dengan terbanyak pada tingkat aktivitas yang sangat aktif.

E. Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asofa, B. (1998). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyiek, F., dkk, (1994). *Wanita Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Budiman, A. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Gramedia: Jakarta.
- Birowo, A. T. (1989). *Aspek Kesempatan Kerja dan Pembangunan Pertanian di Pedesaan Alumni*. Bandung.
- Cahyat. dkk. (2007). *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat Indonesia*. Bogor: CIFOR.
- Chaband, J. (1994). *Mendidik dan Memajukan wanita*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

- Dadang, dkk. (1997). *Membincangkan Feminisme: refleksi muslimah atas peran sosial kaum wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Dwiyanto, A., dkk., (1996). *penduduk dan Pembangunan*, PPKUGM, Yogyakarta.
- Effendi, T., N. (1995). *Kemiskinan, Peluang Kerja dan Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi bagian Makro*. Jakarta: Kanisius. Hakim,
- Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harijani, D. R. (2001). *Etos Kerja Perempuan Desa*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Simajuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Suandi, (1998). *Pekerja Wanita Pada Perkebunan Teh Ditinjau dari Perspektif Gender*. Jakarta: YIIS.
- Suroto, (1992). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Abdul Nashar ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
abdulnashar99@yahoo.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Haeriyah
Universitas Sulawesi Tenggara
haeriyah.1957@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Jawiah, S. (2022). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 17-30.

Abstrak

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Lnggea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada bidang pelaksanaan adminstrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemrintahan di Desa Langgea Indah: a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis; b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa; c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Kata Kunci: Pemerintahan, Peningkatkan Pembangunan, Administrasi.

Abstract

Government Administration plays a role because of the large involvement of the government in the development process in the administrative system. For this reason, so that development goals can actually be achieved as expected, what must be considered is the existence of government officials who have adequate quality. These qualities, apart from being based on adequate abilities and skills, must also be accompanied by high discipline, so that in realizing national goals in accordance with development policies set by the government with an emphasis on development, it is necessary to focus on rural communities because most of Indonesia's population lives in rural areas. This study aims to determine the mechanism for implementing government administration and to determine the factors of implementing government administration in increasing development in Lnggea Indah Village, Angata District, South Konawe Regency. From the results of the study, it can be seen that in the field of implementing the Langgea Indah Village administration, it has not yet fully played an effective role in supporting development. The problems faced in the implementation of the administrative functions of the government in Langgea Indah Village: a. The level of professionalism of the government apparatus in implementing the implementation of the village administration functions both conceptually and technically; b. Poor institutional aspects and management of village development; c. Lack of participation from the local community to carry out the implementation of village development in accordance with the previously made plan.

Keywords: Governance, Improving Development, Administration.

A. Pendahuluan

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Pelaksanaan tugas Administrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan operasional adalah para pejabat professional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor Menteri/Departement/Lembaga lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidang masing masing. Administrasi Pemerintahan yang ada dinegara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada disetiap daerah, dan aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara. Pelaksanaan produk hukum tersebut dilaksanakan sampai ditingkat desa, dimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas mengatur tentang tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab VII Pasal (69) tentang Peraturan Desa yang pada dasarnya mengatur tentang Peraturan Desa demi menunjang pembangunan yang ada Desa. Pelaksanaan dan pembahasan peraturan tersebut dibahas secara bersama untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), di jelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Siagian, 2008). Amin Suprianti (2007: 19) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada dengan pandangan di atas, Saparin (1985 : 34) berpendapat bahwa administrasi pemerintah desa adalah semua proses atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pada tuuan pemerintahaan desa, kegiatan atau proses mana bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata pedesaan atau tata pemerintahan desa dan penerapan prinsip-prinsip adminitrasi negara, seperti fungsi pengendalian hubungan kerja, sinkronisasi, delegasi, wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain.

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan degan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelolah administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa, dimana Pemerintah Kecamatan merupakan daerah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, yang selalu membangun hubungan dengan Pemerintah Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan sesuai dengan peraturan yang ada, disamping itu juga dibutuhkan perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan baik dalam proses administrasi maupun dalam proses pembangunan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk mengoptimalkan proses Administrasi Pemerintahan Desa yang ada dibutuhkan juga komunikasi sebagai sarana penunjang untuk membangun koordinasi dari setiap elemen penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi yang di bangun harus dibaringi dengan kerjasama yang baik agar kegiatan – kegiatan akan berjalan dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang baik harus mengutamakan asas transparansi atau keterbukaan dalam proses administrasi baik pembiayaan (keuangan), penataan, maupun tanggung jawab dalam teknis pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di butuhkan kerjasama dan partisipasi dari setiap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, agar supaya pembangunan yang dilaksanakan akan terlaksana dengan cepat, tepat, tanpah ada sikap kecurigaan dari setiap masyarakat. Administrasi Pemerintahan Desa Langgea Indah dapat dilihat dari pengorganisasian, manajemen, komunikasi, keuangan, kepegawaiaan, hubungan masyarakat. Dan ini semua adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan sarana dan fasilitas desa, pelaksanaan tugas tugas pemerintahan yang bersifat umum, kegiatan kependudukan, kegiatan pembangunan, kegiatan kelembagaan yang ada di Desa, dan pelaksanaan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahanya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, dan ini semua adalah sebagai representative pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang akuntabilitas melalui administrasi yang baik serta manajemen yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.” Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 tersebut diatas, maka dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur dalam bab tersendiri tentang Desa yakni pada Bab XI. Menurut Pasal 2000 bahwa “ Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Setiap upaya untuk menciptakan tujuan pembagian wilayah tersebut perlu mempertimbangkan beberapa prinsip Pertama, perlu optimalisasi pembangunan sumber daya yang ada (alam, manusia dan budaya) diwilayah setempat. Kedua, pembangunan wilayah memerlukan desentralisasi fungsi berupa distribusi kegiatan dari suatu wilayah aktifitas/intensitas tinggi kepada wilayah-wilayah kosong yang potensial. Ketiga, jika kegiatan ekonomi suatu wilayah ditujukan sebagai basis ekspor yaitu pemasaran diluar negeri, maka hal ini memerlukan hubungan langsung (direct link), baik administrasi maupun fisik antara wilayah dan pasar. Ketiga hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah harus berusaha terus menerus memacu pembangunan disegala bidang, yang tampak jelas dengan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Konsekwensi logis dari keadaan tersebut adalah bahwa segenap aparat pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat pusat, harus lebih produktif dan memiliki kualitas kerja yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan secara optimal. Keadaan demikian hanya bisa dicapai apabila proses pembangunan dan pemerintahan berjalan dengan teratur, terarah, efisien dan efektif. Dalam konteks pemikiran demikian maka kemampuan fungsi administrasi pemerintahan atau pembangunan dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Pelaksanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa bertumpuh pada masalah lemahnya penerapan dari pada fungsi administrasi pemerintahan desa.

Penyempurnaan administrasi pemerintah hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu dengan cara pemerintah menempuh berbagai langkah-langkah persiapan pembenahan administrasi pemerintah yakni dengan menciptakan kondisi yang dinamis dalam pengembangan berbagai bidang. Fungsi administrasi pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena semua aktifitas masyarakat tidak luput dari jangkauan administrasi pemerintahan. Khusus dibidang administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan pembentukan/pengadaan berbagai pasilitas penunjang agar tercipta tertib administrasi.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan perlu terus didorong dengan cara meningkatkan pembangunan sektoral, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi dan sumber daya alam serta menumbuh kembangkan kondisi yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa swadaya dan swakarsa menuju desa swasembada. Kesemuanya itu difokuskan ke desa, sehingga desa merupakan tumpuan segala kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan desa yang berdasarkan sistem prioritas. Agar dapat dicapai tujuan pembangunan desa maka keterlibatan masyarakat desa secara langsung sangat diperlukan.

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Langgea Indah kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan berfokus pada pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan diantaranya pembangunan jalan, pembuatan saluran air, pembangunan gapura dan lainlainya.

Setiap upaya pelaksanaan pembangunan di desa hendaknya ditunjang dengan sistem administrasi pemerintahan yang baik. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan kinerja aparat pemerintahan desa yang baik pula guna tercapainya keberhasilan pembangunan. Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Metode openelitian menggunakan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe selatan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan angata Kabupaten Konawe Selatan..

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan beberapa tahap yaitu:

- a. Study kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini.
- b. Peneilitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode:
 1. Observasi (pengamatan) yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
 2. Interview (wawancara) dengan cara melakukan wawancara dengan responden maupun informan kunci guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar panduan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Adminsitrasi pemerintahan dalam meningkatkan proses pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi dan aktivitas kerja dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga dicapai hasil yang optimal. Pada penjelasan bab-bab sebelumnya dikemukakan bahwa adminsitrasi pemerintahan desa diartikan sebagai tingkat pelaksanaan fungsi dari pada fungsi pemerintah desa.

Dalam penelitian ini adminsitrasi pemerintahan desa mencakup fungsi pelayanan masyarakat, fungsi manajerial (oprasional) pembangunan dan fungsi ketatausahaan. Untuk mengetahui lebih jelas dari pada fungsi administrasi dapat diuraikan dalam (3) aspek yaitu:

- a. Fungsi Bidang Pelayanan Inforasi dan Adminsitrasi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aparat pemerintah desa selain merupakan abdi negara juga merupakan abdi masyarakat yang senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Tugas pelayanan yang dimaksud antara lain adalah yang bersifat informasi dan adminsitratif.

Kedua layanan ini penting untuk memudahkan, mendorong dan mempercepat perkembangan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan adanya pemberian pelayanan informasi yang baik dan terus menerus, dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan juga pengalaman dan pola pikir yang maju dalam merencanakan, mengembangkan dan memajukan kehidupan mereka. Sedangkan pelayanan adminsitrasi yang baik, dapat membantu masyarakat memperoleh kemudahan dan aktifitasnya.

Pelayanan informasi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal, dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan oleh aparat desa dan petunjuk pada setiap kesempatan sebagai bahan masukan yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pelayanan informasi secara formal, dapat diwujudkan dengan cara pemberian penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dilaksanakan secara terencana dan terprogram.

Pelayanan yang dimaksud adalah terwujudnya pelaksanaan dari pada setiap tugas administratif secara cepat dan tepat. Efektifitas pemberian layanan informasi ini dalam penelitian, maka kepada responden dintanyakan "Berapa kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini memperoleh layanan informasi baik yang bersifat formal maupun informal?" Untuk mengetahui jawaban responden terhadap layanan informasi oleh pemerintah desa maka dijelaskan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Informasi dari Pemerintah Desa Langgea

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Berkualitas	10	33,30
2	Kurang berkualitas	20	66,70
3	Tidak berkualitas	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa 20 orang atau 66,70% menyatakan kadang-kadang mendapatkan layanan informasi dari aparat pemerintah di sebabkan karena pada saat masyarakat membutuhkan informasi dalam hal pelaksanaan posyandu di desa Langgea Indah , apara pemerintah desa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari jawaban atau tanggap masyarakat dapat dilihat ada masyarakat yang menyatakan bahwa layanan berbagai macam informasi yang dibutuhkan masyarakat kurang mendapat perhatian oleh pihak aparat pemerintah desa. Akibat dari kurang/lambannya informasi yang diberikan tersebut afektifitas masyarakat menjadi kurang lancar, serta kurang berkualitasnya segala kegiatan yang dapat menunjang kelangsungan hdiup masyarakat.

Data tersebut disimpulkan bahwa intensitas laporan informasi sebagai wujud dari pendekatan motivasim psikologi dari unsur pemerintah terhadap masyarakat dalam pembangunan sikap, perilaku dan pola pikir yang maju relatif masih rendah. Kondisi ini dapat ditafsirkan sebagai rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap pentingnya layanan informasi.

Untuk pelayanan di bidang adminsitatif, pengurusan perizinan, KTP atapun urusan-urusan registrasi lainnya dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, maka pada responden diberikan pertanyaan : "Bagaimana penilaian kualitas pelayanan admisnitratif dari aparat desa." Untuk mengetahui pendapat responden terhadap pelayanan aparat pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Berkualitas	8	26,70
2	Kurang berkualitas	10	33,30
3	Tidak berkualitas	12	40
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 12 orang atau 40 %, jauh lebih banyak, hal ini disebabkan karena pada waktu pengurusan dalam bidang administrasi oleh aparat desa relatif lamban bahkan seringkali aparat desa tidak berada ditempat, sehingga masyarakat harus menunggu waktu yang cukup lama. Sebagai contoh dalam pembuatan KTP oleh masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari bisa menjadi 3-4 hari, hal ini merupakan bukti lambannya pelayanan aparat pemerintah desa dalam melakukan pelayanan admisitrasi sehingga dinilai oleh responden tidak berkualitas. Hal itu disebabkan beberapa faktor misalnya sikap tidak peduli dan masa bodoh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Dari keseluruhan data tersebut, memberikan gambaran bahwa mekanisme administrasi pemerintahan desa di Desa Langgea Indah dilihat dari aspek pelayanan bidang administasi belum dapat terlaksana secara efektif. Hal itu disebabkan masih kurangnya perhatian aparat desa terhadap kepentingan masyarakatnya.

b. Fungsi di Bidang Manajemen

Kemampuan aparat dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintah desa dan pembangunan desa, akan tercermin dari efektifitas proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program pembangunan di desa. Dalam penelitian ini organisasi tiak dijelaskan secara konkret dikarenakan pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang telah dibahas dalam 3 (tiga) aspek ini. Untuk lebih jelasnya maka dapat ditelaah lebih jauh sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan yang bertujuan untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tujuan pencapaian pembangunan. Perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.

Perencanaan pemerintah desa merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pemerintah desa merupakan perencanaan jangka pendek, oleh karena itu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langgea Indah terbatas pada subsidi desa. Dalam program-program subsidi desa biasanya direncanakan pemerintah desa, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan desa secara khusus mengenai subsidi desa dilaksanakan melalui forum LPM.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan penetapan perencanaan desa merupakan hal penting untuk diketahui, maka untuk mengetahui tingkat keikutsertaan masyarakat atau responden dalam menentukan pembangunan, maka kepada responden ditanyakan : "Berapa kali anda ikut serta dalam rapat LPM untuk menentukan rencana pembangunan?" Untuk dapat mengetahui frekwensi kehadiran masyarakat dalam rapat LPM di desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan maka dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Kehadiran Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu hadir	11	36,70
2	Kadang-kadang hadir	13	43,30
3	Tidak pernah hadir	6	20,00
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data pada tabel diatas memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap penentuan program pembangunan melalui wadah LPM, masih terbilang rendah. Menurut informasi dari pengurus LPM bahwa rendahnya tingkat kehadiran menunjukkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti penentuan program-program pembangunan. Hal lain penyebab rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap rapat menurut pengamatan penulis adalah faktor kesibukan dari pada warga masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari 30 orang responden sebanyak 11 orang atau 36,70 % yang selalu hadir dalam setiap rapat perencanaan program pembangunan, mereka yang hadir itu pada umumnya merupakan pengurus dan juga sebagai anggota LPM serta warga masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung atas perumusan-perumusan program tertentu, misalnya izin usaha, rencana penerbitan pemilikan hak atas tanah, izin bangun dan lain sebagainya.

Adapun responden yang kadang-kadang hadir dalam rapat perencanaan pembangunan sebanyak 13 orang (43,30) atau sebagian besar merupakan warga masyarakat yang memiliki kegiatan/pekerjaan atau kesibukan lain misalnya pegawai, pedagang, peternak dan masih banyak lagi, sehingga pada aktu rapat diadakan mereka sering tidak berada di tempat walaupun sebelumnya telah diundang. Sedangkan responden yang tidak pernah sama sekali mengikuti rapat perencanaan pembangunan sebanyak 6 orang (20,00%) menurut penulis karena adanya sikap dari pada warga masyarakat yang cenderung kurang peduli pada berbagai persoalan yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian melihat bahwa tingkat kesadaran dari warga masyarakat Langgea Indah dalam menghadiri rapat dalam rangka penentuan rencana program pembangunan di Desa Langgea Indah masih dikatakan kurang, disebabkan oleh kurangnya layanan informasi dan bimbingan yang diberikan oleh aparat desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan yang dibiayai oleh subsidi desa terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh yakni, identifikasi masalah, indentifikasi sumber dan langka penyusunan rencana. Adapun hal yang perlu diperhtikan dalam mengidentifikasi masalah terdapat dua masalah yakni rutin dan masalah pembangunan. Masalah rutin menyangkut :

- a) Kegiatan untuk mewujudkan administrasi desa.
- b) Kegiatan perjalanan ke luar desa.
- c) Kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.
- d) Kegiatan rapat/musyawah LPM.

e) Kegiatan perlombaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang masalah pembangunan di Desa Langgea Indah antara lain meliputi :

- a) masalah yang mendesak dihadapi desa :
- Masalah pangan (paceklik)
 - Masalah air bersih
 - Masalah pendidikan
 - Masalah kesehatan termasuk kesehatan lingkungan.
 - Masalah pengairan
 - Masalah LPM, PPK dan karang taruna
 - Masalah pos-pos keamanan
 - Masalah infra struktur pedesaan.
- b) Masalah partisipasi terhadap terhadap proyek-proyek sektoral seperti,
- Pembangunan KUD
 - Keluarga berencana (KB)
 - Gizi, Balita dan Ibu hamil
 - Raskin dan Kartu Keluarga Miskin
 - Pemugaran perumahan dan lingkungan desa

Dalam tahap indentifikasi, sumber yang dimaksud sebagai tahap untuk mengadakan inventarisasi kemampuan sumber daya yang dapat digunakan misalnya :

- a) Sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah
- Tunjangan kurang penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya.
 - Bantuan pembangunan desa
- b) Sumber pendapatan dari pihak ketiga :
- Koperasi Unit Desa
 - Kredit bank
 - Bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga.

Setelah rencana tersebut disusun selanjutnya disampaikan kepada bupati selaku kepala daerah di wilayah kabupaten melalui camat untuk disahkan. Pengesahan bupati merupakan dasar dari berlakunya rencana pembangunan desa. Berdasarkan langka-langka acuan yang diuraikan diatas, penulis mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan perangkat desa dan warga masyarakat yang merupakan responden untuk dapat mengetahui sejauh mana prosedur perencanaan rencana program subsidi desa yang dilakukan di desa Langgea Indah ini telah sesuai dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan sebagai salah satu mata rantai di dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, memegang peranan penting dalam menyatukan pandangan terhadap masalah yang dihadapi melalui proses perencanaan terpadu maka program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini didasarkan antara lain atas pernyataan responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: "Apakah perencanaan pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Jawaban atas pertanyaan itu dapat di lihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Perencanaan Pembangunan

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	9	30,00
2	Sesuai	15	50,00
3	Kurang sesuai	6	20
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 4 diatas, menunjukkan sebagi]n besar responden menyatakan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah cukup sesuai yaitu dari 30 orang responden 15 (50%). Dalam proses penyusunan yang tersusun berdasarkan dari pada usulan masyarakat Desa Langgea Indah dilihat dari sebagian masyarakat berpendapat bahwa yang diberikan kepada aparat pemerintah desa dapat diterima dan dimasukkan sebagai rencana pembangunan desa sedangkan 6 orang (20%) yang mengatakan kurang sesuai karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, ketidak hadirannya dalam rapat penyusunan pembangunan.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan Desa Langgea Indah belum dapat dikatakan berhasil karena perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari responden, penulis berpendapat bahwa agar dapat mengetahui berhasil tidaknya perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah, maka perlu diketahui model-model perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dipadukan dengan sumber dari data perencanaan pembangunan pada kantor Desa Langgea Indah dapat dilihat bahwa model-model perencanaan di Desa Langgea Indah pada tahun 2017 yaitu :

- Rehabilitasi pasar tradisional
- Rehabilitasi kantor desa
- Pembuatan jalan setapak
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan desa merupakan fungsi yang sangat penting agar dapat menentukan berhasil tidaknya pembangunan yakni fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai rencana yang telah disusun dan disusun dalam bentuk APPKD yang telah dikemukakan perlu direalisasikan agar dapat mencapai sasaran.

Agar melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah adalah pemerintah desa, BPD dan LPM, dalam hal ini LPM hanya sebatas pada pelaksanaan anggaran pembangunan desa. Untuk melihat sejauh mana fungsi pelaksanaan telah dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan di Desa Langgea Indah, maka penulis meneliti mengenai masalah penerahan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana serta kerja bakti di desa.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembangunan di Desa Langgea Indah terdiri atas dua bagian yaitu :

- 1) Kegiatan yang danya bersumber dari pemerintah pusat dan daerah (dana bantuan pembangunan desa).
- 2) Kegiatan yang dananya bersumber dari swadaya murni masyarakat.

Berdasarkan pada pembagian dari kegiatan diatas maka kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah sebagai bantuan desa dipimpin kepala desa. Adapun kegiatan pembangunan yang bersumber dari swadaya murni masyarakat pada umumnya dikerjakan secara gotong royong, sebagian besar dari gotong royong masyarakat tersebut berupa dana, materil/uang, bahan-bahan material termasuk tenaga. Agar dapat mengetahui besarnya sumbangan dari masyarakat maka dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Tanggapan responden terhadap sumbangan masyarakat Dalam pembangunan fisik dan non fisik di Desa Langgea Indah

No.	Jenis Sumbangan	Prekwensi	Persentase (%)
1	Dalam bentuk uang	8	26,70
2	Dalam bentuk barang	12	40,00
3	Dalam bentuk tenaga	10	33,30
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 5 diatas, menunjukkan sebagian warga masyarakat yakni 12 orang (40%) memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Sumbangan dalam bentuk uang dan tenaga tidak begitu jauh berbeda yaitu 8 orang (26,70%) yakni mereka yang telah memiliki penghasilan tetap. Masyarakat yang memberikan bantuan tenaga sebanyak 10 orang (33,3%) berpendapat bahwa selagi tenaga mereka masih dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka, maka dengan hati tulus ikhlas memberikannya.

Berdasarkan dari dua data tersebut diperoleh gambaran bawa masyarakat di Desa Langgea Indah, berperan aktif dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Penilaian masyarakat terhadap pembangunan dapat menjadi masukan dan dorongan bagi pemerintah untuk mengetahui apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk hal itu maka kepada responden ditanyakan: "Apakah perencanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil atau tidak?"

Tabel 6. Tanggapan terhadap berhasil tidaknya pembangunan dilaksanakan

No.	Pelaksanaan Pembangunan	Prekwensi	Persentase (%)
1	Berhasil	9	30,00
2	Cukup berhasil	17	56,70
3	Kurang berhasil	4	33,30
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 6 tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden atau dari 30 orang responden yang mengatakan pelaksanaan pembangunan cukup berhasil sebanyak 17 orang dan diperkuat dari wawancara singkat yang dilakukan peneliti kepada salah seorang masyarakat mengatakan bahwa pembangunan sarana umum yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dirasakan sangat besar manfaatnya bagi warga masyarakat Desa Langgea Indah meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, masyarakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut tidak berhasil sebanyak 4 orang karena menurut mereka hasil-hasil dari pembangunan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan dari data tersebut memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berhasil, faktor penyebab dari hal tersebut karena tidak semua rencana pembangunan diusulkan dan diterima serta terbatasnya dana pembangunan desa.

Adanya kerja sama masyarakat, BPD, LPM, dan kepala desa, dan seluruh perangkat desa maka pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Responden ditanyakan "Apakah keterlibatan bapak pada proses pelaksanaan pembangunan desa disadari oleh?"

Tabel 7. Pernyataan Responden Tentang Keterlibatan pada Proses dari Pelaksanaan Pembangunan Desa Didasari Atas

No.	Keterlibatan proses	Frekwensi	Persentase (%)
1	Kemauan Sendiri	25	83,30
2	Ajakan Orang Lain	5	16,70
3	Adanya Paksaan	0	0,00
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 7 di atas, menunjukkan mayoritas atau 25 orang penduduk yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa atas kemauan dan kesadaran sendiri, hanya 5 orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan atas ajakan dari orang lain misalnya ajakan istri dan lain-lain, disebabkan masyarakat tersebut kurang begitu mengerti kegunaan dan manfaat dari pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Langgea Indah .

Berdasarkan pada data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikut terlibat masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan cukup antusias. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dari masyarakat Desa Langgea Indah akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk melancarkan dan menunjang keberhasilan pembangunan desa begitu besar.

Hasil penelitian menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah , telah dilihat dengan peran masyarakat cukup ikut adil dalam proses pelaksanaan pembangunan meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang berperan aktif. Sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Langgea Indah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan yang baik adalah pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan dengan baik dan sistimatis melalui sistem, metode dan proses yang telah direncanakan. Di dalam lingkungan organisasi pemerintahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dijalankan melalui sistem pelaksanaan terpadu (*mixed pllaning*) yaitu dengan memadukan perencanaan dari bawah dan dari atas.

Berdasarkan hasil dari rapat yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan proses pelaksanaan pembangunan, maka proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila kemampuan dan kualitas dari para perencana dan pelaksana pembangunan yang terdiri dari BPD dan LPM. Maka kepada para responden ditanyakan "apakah menurut bapak kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana yang

terdiri dari kepala desa, BPD dan LPM dapat dikategorikan?" Hasilnya dapat di lihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Pernyataan Responden Tentang Kemampuan dan Kualitas yang dimiliki Oleh Pihak Perencana dan Pelaksana Pembangunan Fisik dan Nonfisik

No.	Uraian	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	8	30,00
2	Cukup Baik	15	36,70
3	Kurang Baik	7	33,30
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 15 orang atau 36,79 % mengatakan bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa itu cukup baik, 8 orang atau 30% mengatakan baik, sisanya sebanyak 7 orang atau 33,30% berpendapat bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, berpendapat bahwa kurang baiknya kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa, karena adanya beberapa faktor, salah satunya yakni adanya ketidak puasan dari hasil telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, ada masyarakat yang menginginkan didirikannya WC umum tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa di Desa Langgea Indah .

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah segala aktifitas dan aspek yang menyangkut keberhasilan pembangunan desa, maka aspek administrasi pemerintahan desa juga harus berjalan dengan baik agar perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Agar dapat mengetahui peran dari administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik maka pada tabel 9 dikemukakan pernyataan tentang peran pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam pembangunan Desa Langgea Indah sebagai berikut :

Tabel 9. Pernyataan Responden Tentang bagaimana Peran Pelaksana Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa

No.	Pernyataan	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	10	33,30
2	Cukup Baik	17	56,70
3	Kurang Baik	3	10,00
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 17 orang (56,70%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa sudah cukup baik, hal ini terlihat dalam proses administrasi pemerintahan desa sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa, meskipun masih terdapat beberapa kendala, 10 orang (33,30%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa sudah baik, sedangkan 3 orang (10,00%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa masih kurang baik.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berhasil, hal ini disebabkan karena tidak semua peran perencana dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berjalan dan dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya, karena terdapat beberapa hambatan baik materiil maupun immateriil. Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa masih ada sebagian kecil dari warga masyarakat desa yang kurang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pengawasan

Tujuan dari pada pengawasan ini sebagai langkah konkret dari kegiatan yang perlu diambil agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan dilakukan perbaikan apabila didalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari tujuan sebelumnya serta dapat berhasil dengan baik. Adapun kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan, inspeksi, dan berbagai tindakan lain yang dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang

telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan itu sendiri yakni :

- a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan dapat berdaya guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b) Agar hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat dan kesimpulan dan sasaran dari berbagai kebijakan perencanaan pembangunan.
- c) Untuk mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang dan uang milik negara, serta menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah.

Berdasarkan atas penjelasan diatas mengenai pengawasan maka penulis telah mengadakan wawancara singkat dengan aparat pemerintah Desa Langgea Indah dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan subsidi desa.

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan keterangan bahwa keuangan desa yang diperoleh dari subsidi desa mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh aparat pengawasan terbatas pada pelaporan, artinya pemerintah desa hanya memberikan informasi laporan kepada camat kemudian kepada bupati dan gubernur sampai kepada menteri dalam negeri mengenai realisasi pelaksanaan pembangunan. Selama ini belum ada pengecekan yang terjun langsung oleh aparat pengawasan fungsional (inspektorat wilayah daerah kabupaten).

Berdasarkan pula dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dipandang dari aspek pengawasan Desa Langgea Indah dinilai belum terlaksana secara efektif dan konsisten. Hal ini terlihat dari antara lain, tingginya frekwensi pelaksanaan konsultasi teknis menandakan banyaknya masalah yang dihadapi di lapangan.

Tidak adanya pengawasan langsung ini maka dapat dikatakan bahwa selalu terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini sebenarnya dapat dicegah bila saja sistem pengawasan oleh masyarakat berjalan efektif, dalam artian masyarakat ikut dalam pengawasan kegiatan pembangunan di daerah mereka.

Hal tersebut dapat terwujud apabila fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, namun didalam kenyataan di Desa Langgea Indah lembaga pemberdayaan masyarakat ini belum sepenuhnya berperan aktif. Sebagian besar rencana desa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, sedangkan pengawasan sepenuhnya berada ditangan kepala desa.

c. Fungsi Bidang Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan mempunyai fungsi dan tugas yang begitu penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Tertib administrasi ketatausahaan perlu diperbaiki agar tercapai sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, maka keterampilan dan keahlian dari para aparat desa untuk dapat menyelenggarakan tugas ketatausahaan dengan sempurna.

Tugas dari tatausaha ini yaitu mencakup segala bentuk kegiatan masalah registrasi, catat mencatat, menyimpan dokumen dan surat-surat penting lainnya, menerima dan mengirim informasi dari berbagai keterangan.

Tabel 10. Pernyataan Responden Tentang bagaimana Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketatausahaan dalam Kegiatan Registrasi di Lingkup Pemerintahan Desa

No.	Pernyataan	Frekwensi	Persentase (%)
1	Efektif	3	10,00
2	Cukup Efektif	10	33,30
3	Kurang Efektif	17	56,70
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 10 di atas, menunjukkan dari 30 orang responden 17 orang mengatakan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di bidang ketatausahaan belum baik, hal ini terlihat pada proses administrasi bidang ketatausahaan pelaksanaan kegiatan registrasinya belum efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana, seperti lemari, komputer, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan tata ruang kantor. 10 orang menyatakan bahwa peran pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di bidang ketatausahaan sudah cukup baik sedangkan 3 orang menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca

pembangunan desa di bidang ketatausahaan sudah efektif.

Hasil dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi ketatausahaan di Desa Langgea Indah belum berjalan sebagaimana mestinya dalam kelancaran dalam proses pembangunan. Kurang efektifnya tugas-tugas ketatausahaan di Desa Langgea Indah dilihat pada pengisian buku registrasi, yang diisi kurang rapi dan teratur serta tidak akurat dalam memberikan informasi keadaan wilayah, data-data monografi desa tidak lengkap serta belum sesuai dengan pendataan data-data penduduk.

Karena faktor inilah yang menyebabkan kurangnya efektifnya penyelenggaraan fungsi dan tugas tatausaha ini, sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di desa Langgea Indah, inilah yang menyebabkan proses pembangunan memerlukan persediaan data yang akurat sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan.

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa dari hasil identifikasi kebutuhan dan kepentingan serta potensi masyarakat Desa Langgea Indah kemudian data tersebut diajukan oleh LPM dalam bentuk rancangan kemudian dibahas dalam musyawarah pembangunan desa.

Faktor-faktor yang mendorong Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dimaksudkan adalah sebagai faktor yang strategis yang memungkinkan berhasilnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan desa tergantung pada intensitas daya dukung seperti :

a. Tersedianya perangkat aturan

Perangkat aturan memegang peranan penting dan strategis sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi. Hal ini dapat dipahami karena adanya perangkat aturan yang memuat secara jelas dan sistematis mengenai metode dan prosedur memungkinkan penyelenggaraan administrasi dapat terlaksanakan dengan baik

b. Faktor Kelembagaan

Penyelenggaraan administrasi sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dan terprogram berjalan efektif apabila didukung oleh tersedianya lembaga sebagai sarana strategis dalam melaksanakan kegiatan dan ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dimaksud adalah faktor yang sifatnya menghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dalam upaya menciptakan iklim kerja. Hasil pengamatan penulis terhadap pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu:

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran aparat

Kesadaran aparat sangat menentukan tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi kerja, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan untuk mentaati dan mematuhi aturan dalam arti melaksanakan apa yang diwajibkan dan menghindari apa yang dilarang. Hasil penelitian bahwa baik atasan maupun bawahan masih ada memiliki tingkat kesadaran rendah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

2) Pelaksanaan koordinasi belum optimal

Hasil analisis penulis terhadap berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme administrasi di lingkungan kantor Desa Langgea Indah menampakkan bahwa faktor lain yang menyebabkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat adalah belum terkoordinasi secara optimal fungsi administrasi, hal itu dapat dilihat :

a) Belum terciptanya kesamaan pandang antara kepala desa dengan perangkat desa terhadap sistem, metode, prosedur pelayanan sehingga masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri.

b) Belum diterapkannya manajemen administrasi pemerintahan desa secara profesional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada bidang pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Hal itu dapat dilihat pada aspek mekanisme pelayanan administrasi pembangunan maupun dari aspek ketatausahaan dalam proses pembangunan.
 - a. Aspek pelayanan, khusus bidang informasi dan administratif dinilai belum terlaksana secara efektif disebabkan karena faktor rendahnya tingkat layanan informasi baik secara formal maupun informal yang diberikan oleh aparat desa kepada masyarakat.
 - b. Fungsi operasional administrasi pembangunan pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal itu terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam menghadiri rapat di desa, dalam proses perencanaan dan pembangunan. Lemahnya penyusunan anggaran pembangunan, khususnya anggaran pendapatan dan pengeluaran desa, karena pelaksanaannya masih didominasi oleh aparat desa bersama pengurus LPM dan tidak adanya pengawasan secara langsung.
 - c. Fungsi ketatausahaan atau fungsi registrasi belum efektif, dilihat dari kurangnya tertibnya pengisian buku registrasi dan tidak tersedianya pada struktur dan informasi yang akurat di balai desa.
2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di Desa Langgea Indah .
 - a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis.
 - b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa.
 - c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

E. Referensi

- Barata, I. N. (1982) *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Dasar-dasar penelitian Kualitatif, terjemahan oleh A. Khozim Afnadi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bowman, P.J. (1984). *Ilmu masyarakat dan Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadippemomo (1989), *Tata Personalia*. Jakarta: Djambatan.
- Handayaningrat, S. (1985). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kuwo, J. R. (1999). *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Malaranggeng, A., dkk., (2001). *Otonomi Daerah Dalam Profek Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Brigaf Publisng.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manullang. (1979), *Pembangunan Pengawal*. Bandung: Alumni.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategis Untuk Organisasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Salusu, J. (1996), *Dimensi Aparatur Dalam Pembangunan*. Jakarta: LAN RI.
- Saputra, S. (1981). *Pengaruh Teknologi dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: LBI.
- Siagian, S. P. (1982). *Organisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Slamet, I. E. (1965) *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Baratha.



Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Abdul Nashar ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
abdulnashar99@yahoo.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Haeriyah
Universitas Sulawesi Tenggara
haeriyah.1957@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nashar, A., & Haeriyah. (2022). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 17-30.

Abstrak

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Lnggea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada bidang pelaksanaan adminstrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di Desa Langgea Indah: a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis; b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa; c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Kata Kunci: Pemerintahan, Peningkatkan Pembangunan, Administrasi.

Abstract

Government Administration plays a role because of the large involvement of the government in the development process in the administrative system. For this reason, so that development goals can actually be achieved as expected, what must be considered is the existence of government officials who have adequate quality. These qualities, apart from being based on adequate abilities and skills, must also be accompanied by high discipline, so that in realizing national goals in accordance with development policies set by the government with an emphasis on development, it is necessary to focus on rural communities because most of Indonesia's population lives in rural areas. This study aims to determine the mechanism for implementing government administration and to determine the factors of implementing government administration in increasing development in Lnggea Indah Village, Angata District, South Konawe Regency. From the results of the study, it can be seen that in the field of implementing the Langgea Indah Village administration, it has not yet fully played an effective role in supporting development. The problems faced in the implementation of the administrative functions of the government in Langgea Indah Village: a. The level of professionalism of the government apparatus in implementing the implementation of the village administration functions both conceptually and technically; b. Poor institutional aspects and management of village development; c. Lack of participation from the local community to carry out the implementation of village development in accordance with the previously made plan.

Keywords: Governance, Improving Development, Administration.

A. Pendahuluan

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Pelaksanaan tugas Administrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan operasional adalah para pejabat professional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor Menteri/Departement/Lembaga lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidang masing masing. Administrasi Pemerintahan yang ada dinegara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada disetiap daerah, dan aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara. Pelaksanaan produk hukum tersebut dilaksanakan sampai ditingkat desa, dimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas mengatur tentang tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab VII Pasal (69) tentang Peraturan Desa yang pada dasarnya mengatur tentang Peraturan Desa demi menunjang pembangunan yang ada Desa. Pelaksanaan dan pembahasan peraturan tersebut dibahas secara bersama untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), di jelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Siagian, 2008). Amin Suprianti (2007: 19) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada dengan pandangan di atas, Saparin (1985 : 34) berpendapat bahwa administrasi pemerintah desa adalah semua proses atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pada tuuan pemerintahaan desa, kegiatan atau proses mana bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata pedesaan atau tata pemerintahan desa dan penerapan prinsip-prinsip adminitrasi negara, seperti fungsi pengendalian hubungan kerja, sinkronisasi, delegasi, wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain.

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan degan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelolah administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa, dimana Pemerintah Kecamatan merupakan daerah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, yang selalu membangun hubungan dengan Pemerintah Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan sesuai dengan peraturan yang ada, disamping itu juga dibutuhkan perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan baik dalam proses administrasi maupun dalam proses pembangunan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk mengoptimalkan proses Administrasi Pemerintahan Desa yang ada dibutuhkan juga komunikasi sebagai sarana penunjang untuk membangun koordinasi dari setiap elemen penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi yang di bangun harus dibaringi dengan kerjasama yang baik agar kegiatan – kegiatan akan berjalan dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang baik harus mengutamakan asas transparansi atau keterbukaan dalam proses administrasi baik pembiayaan (keuangan), penataan, maupun tanggung jawab dalam teknis pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di butuhkan kerjasama dan partisipasi dari setiap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, agar supaya pembangunan yang dilaksanakan akan terlaksana dengan cepat, tepat, tanpah ada sikap kecurigaan dari setiap masyarakat. Administrasi Pemerintahan Desa Langgea Indah dapat dilihat dari pengorganisasian, manajemen, komunikasi, keuangan, kepegawaiaan, hubungan masyarakat. Dan ini semua adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan sarana dan fasilitas desa, pelaksanaan tugas tugas pemerintahan yang bersifat umum, kegiatan kependudukan, kegiatan pembangunan, kegiatan kelembagaan yang ada di Desa, dan pelaksanaan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahanya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, dan ini semua adalah sebagai representative pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang akuntabilitas melalui administrasi yang baik serta manajemen yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.” Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 tersebut diatas, maka dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur dalam bab tersendiri tentang Desa yakni pada Bab XI. Menurut Pasal 2000 bahwa “ Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Setiap upaya untuk menciptakan tujuan pembagian wilayah tersebut perlu mempertimbangkan beberapa prinsip Pertama, perlu optimalisasi pembangunan sumber daya yang ada (alam, manusia dan budaya) diwilayah setempat. Kedua, pembangunan wilayah memerlukan desentralisasi fungsi berupa distribusi kegiatan dari suatu wilayah aktifitas/intensitas tinggi kepada wilayah-wilayah kosong yang potensial. Ketiga, jika kegiatan ekonomi suatu wilayah ditujukan sebagai basis ekspor yaitu pemasaran diluar negeri, maka hal ini memerlukan hubungan langsung (direct link), baik administrasi maupun fisik antara wilayah dan pasar. Ketiga hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah harus berusaha terus menerus memacu pembangunan disegala bidang, yang tampak jelas dengan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Konsekwensi logis dari keadaan tersebut adalah bahwa segenap aparat pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat pusat, harus lebih produktif dan memiliki kualitas kerja yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan secara optimal. Keadaan demikian hanya bisa dicapai apabila proses pembangunan dan pemerintahan berjalan dengan teratur, terarah, efisien dan efektif. Dalam konteks pemikiran demikian maka kemampuan fungsi administrasi pemerintahan atau pembangunan dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Pelaksanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa bertumpuh pada masalah lemahnya penerapan dari pada fungsi administrasi pemerintahan desa.

Penyempurnaan administrasi pemerintah hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu dengan cara pemerintah menempuh berbagai langkah-langkah persiapan pembenahan administrasi pemerintah yakni dengan menciptakan kondisi yang dinamis dalam pengembangan berbagai bidang. Fungsi administrasi pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena semua aktifitas masyarakat tidak luput dari jangkauan administrasi pemerintahan. Khusus dibidang administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan pembentukan/pengadaan berbagai fasilitas penunjang agar tercipta tertib administrasi.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan perlu terus didorong dengan cara meningkatkan pembangunan sektoral, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi dan sumber daya alam serta menumbuh kembangkan kondisi yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa swadaya dan swakarsa menuju desa swasembada. Kesemuanya itu difokuskan ke desa, sehingga desa merupakan tumpuan segala kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan desa yang berdasarkan sistem prioritas. Agar dapat dicapai tujuan pembangunan desa maka keterlibatan masyarakat desa secara langsung sangat diperlukan.

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Langgea Indah kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan berfokus pada pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan diantaranya pembangunan jalan, pembuatan saluran air, pembangunan gapura dan lainlainya.

Setiap upaya pelaksanaan pembangunan di desa hendaknya ditunjang dengan sistem administrasi pemerintahan yang baik. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan kinerja aparat pemerintahan desa yang baik pula guna tercapainya keberhasilan pembangunan. Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Metode openelitian menggunakan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe selatan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan angata Kabupaten Konawe Selatan..

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan beberapa tahap yaitu:

- a. Study kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini.
- b. Peneilitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode:
 1. Observasi (pengamatan) yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
 2. Interview (wawancara) dengan cara melakukan wawancara dengan responden maupun informan kunci guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar panduan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Adminsitrasi pemerintahan dalam meningkatkan proses pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi dan aktivitas kerja dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga dicapai hasil yang optimal. Pada penjelasan bab-bab sebelumnya dikemukakan bahwa adminsitrasi pemerintahan desa diartikan sebagai tingkat pelaksanaan fungsi dari pada fungsi pemerintah desa.

Dalam penelitian ini adminsitrasi pemerintahan desa mencakup fungsi pelayanan masyarakat, fungsi manajerial (oprasional) pembangunan dan fungsi ketatausahaan. Untuk mengetahui lebih jelas dari pada fungsi administrasi dapat diuraikan dalam (3) aspek yaitu:

- a. Fungsi Bidang Pelayanan Inforasi dan Adminsitrasi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aparat pemerintah desa selain merupakan abdi negara juga merupakan abdi masyarakat yang senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Tugas pelayanan yang dimaksud antara lain adalah yang bersifat informasi dan adminsitratif.

Kedua layanan ini penting untuk memudahkan, mendorong dan mempercepat perkembangan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan adanya pemberian pelayanan informasi yang baik dan terus menerus, dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan juga pengalaman dan pola pikir yang maju dalam merencanakan, mengembangkan dan memajukan kehidupan mereka. Sedangkan pelayanan adminsitrai yang baik, dapat membantu masyarakat memperoleh kemudahan dan aktifitasnya.

Pelayanan informasi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal, dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan oleh aparat desa dan petunjuk pada setiap kesempatan sebagai bahan masukan yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pelayanan informasi secara formal, dapat diwujudkan dengan cara pemberian penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dilaksanakan secara terencana dan terprogram.

Pelayanan yang dimaksud adalah terwujudnya pelaksanaan dari pada setiap tugas administratif secara cepat dan tepat. Efektifitas pemberian layanan informasi ini dalam penelitian, maka kepada responden dintanyakan "Berapa kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini memperoleh layanan informasi baik yang bersifat formal maupun informal?" Untuk mengetahui jawaban responden terhadap layanan informasi oleh pemerintah desa maka dijelaskan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Informasi dari Pemerintah Desa Langgea

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Berkualitas	10	33,30
2	Kurang berkualitas	20	66,70
3	Tidak berkualitas	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa 20 orang atau 66,70% menyatakan kadang-kadang mendapatkan layanan informasi dari aparat pemerintah di sebabkan karena pada saat masyarakat membutuhkan informasi dalam hal pelaksanaan posyandu di desa Langgea Indah , apara pemerintah desa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari jawaban atau tanggap masyarakat dapat dilihat ada masyarakat yang menyatakan bahwa layanan berbagai macam informasi yang dibutuhkan masyarakat kurang mendapat perhatian oleh pihak aparat pemerintah desa. Akibat dari kurang/lambannya informasi yang diberikan tersebut afektifitas masyarakat menjadi kurang lancar, serta kurang berkualitasnya segala kegiatan yang dapat menunjang kelangsungan hdiup masyarakat.

Data tersebut disimpulkan bahwa intensitas laporan informasi sebagai wujud dari pendekatan motivasim psikologi dari unsur pemerintah terhadap masyarakat dalam pembangunan sikap, perilaku dan pola pikir yang maju relatif masih rendah. Kondisi ini dapat ditafsirkan sebagai rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap pentingnya layanan informasi.

Untuk pelayanan di bidang adminsitatif, pengurusan perizinan, KTP atapun urusan-urusan registrasi lainnya dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, maka pada responden diberikan pertanyaan : "Bagaimana penilaian kualitas pelayanan admisnitratif dari aparat desa." Untuk mengetahui pendapat responden terhadap pelayanan aparat pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Berkualitas	8	26,70
2	Kurang berkualitas	10	33,30
3	Tidak berkualitas	12	40
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 12 orang atau 40 %, jauh lebih banyak, hal ini disebabkan karena pada waktu pengurusan dalam bidang administrasi oleh aparat desa relatif lamban bahkan seringkali aparat desa tidak berada ditempat, sehingga masyarakat harus menunggu waktu yang cukup lama. Sebagai contoh dalam pembuatan KTP oleh masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari bisa menjadi 3-4 hari, hal ini merupakan bukti lambannya pelayanan aparat pemerintah desa dalam melakukan pelayanan admisitrasi sehingga dinilai oleh responden tidak berkualitas. Hal itu disebabkan beberapa faktor misalnya sikap tidak peduli dan masa bodoh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Dari keseluruhan data tersebut, memberikan gambaran bahwa mekanisme administrasi pemerintahan desa di Desa Langgea Indah dilihat dari aspek pelayanan bidang administasi belum dapat terlaksana secara efektif. Hal itu disebabkan masih kurangnya perhatian aparat desa terhadap kepentingan masyarakatnya.

b. Fungsi di Bidang Manajemen

Kemampuan aparat dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintah desa dan pembangunan desa, akan tercermin dari efektifitas proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program pembangunan di desa. Dalam penelitian ini organisasi tiak dijelaskan secara konkret dikarenakan pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang telah dibahas dalam 3 (tiga) aspek ini. Untuk lebih jelasnya maka dapat ditelaah lebih jauh sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan yang bertujuan untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tujuan pencapaian pembangunan. Perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.

Perencanaan pemerintah desa merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pemerintah desa merupakan perencanaan jangka pendek, oleh karena itu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langgea Indah terbatas pada subsidi desa. Dalam program-program subsidi desa biasanya direncanakan pemerintah desa, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan desa secara khusus mengenai subsidi desa dilaksanakan melalui forum LPM.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan penetapan perencanaan desa merupakan hal penting untuk diketahui, maka untuk mengetahui tingkat keikutsertaan masyarakat atau responden dalam menentukan pembangunan, maka kepada responden ditanyakan : "Berapa kali anda ikut serta dalam rapat LPM untuk menentukan rencana pembangunan?" Untuk dapat mengetahui frekwensi kehadiran masyarakat dalam rapat LPM di desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan maka dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Kehadiran Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu hadir	11	36,70
2	Kadang-kadang hadir	13	43,30
3	Tidak pernah hadir	6	20,00
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Data pada tabel diatas memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap penentuan program pembangunan melalui wadah LPM, masih terbilang rendah. Menurut informasi dari pengurus LPM bahwa rendahnya tingkat kehadiran menunjukkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti penentuan program-program pembangunan. Hal lain penyebab rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap rapat menurut pengamatan penulis adalah faktor kesibukan dari pada warga masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari 30 orang responden sebanyak 11 orang atau 36,70 % yang selalu hadir dalam setiap rapat perencanaan program pembangunan, mereka yang hadir itu pada umumnya merupakan pengurus dan juga sebagai anggota LPM serta warga masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung atas perumusan-perumusan program tertentu, misalnya izin usaha, rencana penerbitan pemilikan hak atas tanah, izin bangun dan lain sebagainya.

Adapun responden yang kadang-kadang hadir dalam rapat perencanaan pembangunan sebanyak 13 orang (43,30) atau sebagian besar merupakan warga masyarakat yang memiliki kegiatan/pekerjaan atau kesibukan lain misalnya pegawai, pedagang, peternak dan masih banyak lagi, sehingga pada aktu rapat diadakan mereka sering tidak berada di tempat walaupun sebelumnya telah diundang. Sedangkan responden yang tidak pernah sama sekali mengikuti rapat perencanaan pembangunan sebanyak 6 orang (20,00%) menurut penulis karena adanya sikap dari pada warga masyarakat yang cenderung kurang peduli pada berbagai persoalan yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian melihat bahwa tingkat kesadaran dari warga masyarakat Langgea Indah dalam menghadiri rapat dalam rangka penentuan rencana program pembangunan di Desa Langgea Indah masih dikatakan kurang, disebabkan oleh kurangnya layanan informasi dan bimbingan yang diberikan oleh aparat desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan yang dibiayai oleh subsidi desa terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh yakni, identifikasi masalah, indentifikasi sumber dan langka penyusunan rencana. Adapun hal yang perlu diperhtikan dalam mengidentifikasi masalah terdapat dua masalah yakni rutin dan masalah pembangunan. Masalah rutin menyangkut :

- a) Kegiatan untuk mewujudkan administrasi desa.
- b) Kegiatan perjalanan ke luar desa.
- c) Kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.
- d) Kegiatan rapat/musyawah LPM.

e) Kegiatan perlombaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang masalah pembangunan di Desa Langgea Indah antara lain meliputi :

- a) masalah yang mendesak dihadapi desa :
- Masalah pangan (paceklik)
 - Masalah air bersih
 - Masalah pendidikan
 - Masalah kesehatan termasuk kesehatan lingkungan.
 - Masalah pengairan
 - Masalah LPM, PPK dan karang taruna
 - Masalah pos-pos keamanan
 - Masalah infra struktur pedesaan.
- b) Masalah partisipasi terhadap terhadap proyek-proyek sektoral seperti,
- Pembangunan KUD
 - Keluarga berencana (KB)
 - Gizi, Balita dan Ibu hamil
 - Raskin dan Kartu Keluarga Miskin
 - Pemugaran perumahan dan lingkungan desa

Dalam tahap indentifikasi, sumber yang dimaksud sebagai tahap untuk mengadakan inventarisasi kemampuan sumber daya yang dapat digunakan misalnya :

- a) Sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah
- Tunjangan kurang penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya.
 - Bantuan pembangunan desa
- b) Sumber pendapatan dari pihak ketiga :
- Koperasi Unit Desa
 - Kredit bank
 - Bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga.

Setelah rencana tersebut disusun selanjutnya disampaikan kepada bupati selaku kepala daerah di wilayah kabupaten melalui camat untuk disahkan. Pengesahan bupati merupakan dasar dari berlakunya rencana pembangunan desa. Berdasarkan langka-langka acuan yang diuraikan diatas, penulis mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan perangkat desa dan warga masyarakat yang merupakan responden untuk dapat mengetahui sejauh mana prosedur perencanaan rencana program subsidi desa yang dilakukan di desa Langgea Indah ini telah sesuai dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan sebagai salah satu mata rantai di dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, memegang peranan penting dalam menyatukan pandangan terhadap masalah yang dihadapi melalui proses perencanaan terpadu maka program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini didasarkan antara lain atas pernyataan responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: "Apakah perencanaan pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Jawaban atas pertanyaan itu dapat di lihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Perencanaan Pembangunan

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	9	30,00
2	Sesuai	15	50,00
3	Kurang sesuai	6	20
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 4 diatas, menunjukkan sebagi]n besar responden menyatakan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah cukup sesuai yaitu dari 30 orang responden 15 (50%). Dalam proses penyusunan yang tersusun berdasarkan dari pada usulan masyarakat Desa Langgea Indah dilihat dari sebagian masyarakat berpendapat bahwa yang diberikan kepada aparat pemerintah desa dapat diterima dan dimasukkan sebagai rencana pembangunan desa sedangkan 6 orang (20%) yang mengatakan kurang sesuai karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, ketidak hadirannya dalam rapat penyusunan pembangunan.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan Desa Langgea Indah belum dapat dikatakan berhasil karena perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari responden, penulis berpendapat bahwa agar dapat mengetahui berhasil tidaknya perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah, maka perlu diketahui model-model perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dipadukan dengan sumber dari data perencanaan pembangunan pada kantor Desa Langgea Indah dapat dilihat bahwa model-model perencanaan di Desa Langgea Indah pada tahun 2017 yaitu :

- Rehabilitasi pasar tradisional
- Rehabilitasi kantor desa
- Pembuatan jalan setapak
- Peninhkatan kesejahteraan masyarakat

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan desa merupakan fungsi yang sangat penting agar dapat menentukan berhasil tidaknya pembangunan yakni fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai rencana yang telah disusun dan disusun dalam bentuk APPKD yang telah dikemukakan perlu direalisasikan agar dapat mencapai sasaran.

Agar melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah adalah pemerintah desa, BPD dan LPM, dalam hal ini LPM hanya sebatas pada pelaksanaan anggaran pembangunan desa. Untuk melihat sejauh mana fungsi pelaksanaan telah dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan di Desa Langgea Indah, maka penulis meneliti mengenai masalah penerahan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana serta kerja bakti di desa.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembangunan di Desa Langgea Indah terdiri atas dua bagian yaitu :

- 1) Kegiatan yang danya bersumber dari pemerintah pusat dan daerah (dana bantuan pembangunan desa).
- 2) Kegiatan yang dananya bersumber dari swadaya murni masyarakat.

Berdasarkan pada pembagian dari kegiatan diatas maka kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah sebagai bantuan desa dipimpin kepala desa. Adapun kegiatan pembangunan yang bersumber dari swadaya murni masyarakat pada umumnya dikerjakan secara gotong royong, sebagian besar dari gotong royong masyarakat tersebut berupa dana, materil/uang, bahan-bahan material termasuk tenaga. Agar dapat mengetahui besarnya sumbangan dari masyarakat maka dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Tanggapan responden terhadap sumbangan masyarakat Dalam pembangunan fisk dan non fisik di Desa Langgea Indah

No.	Jenis Sumbangan	Prekwensi	Persentase (%)
1	Dalam bentuk uang	8	26,70
2	Dalam bentuk barang	12	40,00
3	Dalam bentuk tenaga	10	33,30
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 5 diatas, menunjukkan sebagian warga masyarakat yakni 12 orang (40%) memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Sumbangan dalam bentuk uang dan tenaga tidak begitu jauh berbeda yaitu 8 orang (26,70%) yakni mereka yang telah memiliki penghasilan tetap. Masyarakat yang memberikan bantuan tenaga sebanyak 10 orang (33,3%) berpendapat bahwa selagi tenaga mereka masih dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka, maka dengan hati tulus ikhlas memberikannya.

Berdasarkan dari dua data terebut diperoleh gambaran bawa masyarakat di Desa Langgea Indah, berperan aktif dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Penilaian masyarakat terhadap pembangunan dapat menjadi masukan dan dorongan bagi pemerintah untuk mengetahui apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk hal itu maka kepada responden ditanyakan: "Apakah perencanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil atau tidak?"

Tabel 6. Tanggapan terhadap berhasil tidaknya pembangunan dilaksanakan

No.	Pelaksanaan Pembangunan	Prekwensi	Persentase (%)
1	Berhasil	9	30,00
2	Cukup berhasil	17	56,70
3	Kurang berhasil	4	33,30
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 6 tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden atau dari 30 orang responden yang mengatakan pelaksanaan pembangunan cukup berhasil sebanyak 17 orang dan diperkuat dari wawancara singkat yang dilakukan peneliti kepada salah seorang masyarakat mengatakan bahwa pembangunan sarana umum yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dirasakan sangat besar manfaatnya bagi warga masyarakat Desa Langgea Indah meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, masyarakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut tidak berhasil sebanyak 4 orang karena menurut mereka hasil-hasil dari pembangunan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan dari data tersebut memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berhasil, faktor penyebab dari hal tersebut karena tidak semua rencana pembangunan diusulkan dan diterima serta terbatasnya dana pembangunan desa.

Adanya kerja sama masyarakat, BPD, LPM, dan kepala desa, dan seluruh perangkat desa maka pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Responden ditanyakan "Apakah keterlibatan bapak pada proses pelaksanaan pembangunan desa disadari oleh?"

Tabel 7. Pernyataan Responden Tentang Keterlibatan pada Proses dari Pelaksanaan Pembangunan Desa Didasari Atas

No.	Keterlibatan proses	Frekwensi	Persentase (%)
1	Kemauan Sendiri	25	83,30
2	Ajakan Orang Lain	5	16,70
3	Adanya Paksaan	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 7 di atas, menunjukkan mayoritas atau 25 orang penduduk yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa atas kemauan dan kesadaran sendiri, hanya 5 orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan atas ajakan dari orang lain misalnya ajakan istri dan lain-lain, disebabkan masyarakat tersebut kurang begitu mengerti kegunaan dan manfaat dari pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Langgea Indah .

Berdasarkan pada data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikut terlibat masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan cukup antusias. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dari masyarakat Desa Langgea Indah akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk melancarkan dan menunjang keberhasilan pembangunan desa begitu besar.

Hasil penelitian menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah , telah dilihat dengan peran masyarakat cukup ikut adil dalam proses pelaksanaan pembangunan meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang berperan aktif. Sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Langgea Indah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan yang baik adalah pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan dengan baik dan sistimatis melalui sistem, metode dan proses yang telah direncanakan. Di dalam lingkungan organisasi pemerintahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dijalankan melalui sistem pelaksanaan terpadu (*mixed pllaning*) yaitu dengan memadukan perencanaan dari bawah dan dari atas.

Berdasarkan hasil dari rapat yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan proses pelaksanaan pembangunan, maka proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila kemampuan dan kualitas dari para perencana dan pelaksana pembangunan yang terdiri dari BPD dan LPM. Maka kepada para responden ditanyakan "apakah menurut bapak kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana yang

terdiri dari kepala desa, BPD dan LPM dapat dikategorikan?" Hasilnya dapat di lihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Pernyataan Responden Tentang Kemampuan dan Kualitas yang dimiliki Oleh Pihak Perencana dan Pelaksana Pembangunan Fisik dan Nonfisik

No.	Uraian	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	8	30,00
2	Cukup Baik	15	36,70
3	Kurang Baik	7	33,30
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 15 orang atau 36,79% mengatakan bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa itu cukup baik, 8 orang atau 30% mengatakan baik, sisanya sebanyak 7 orang atau 33,30% berpendapat bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, berpendapat bahwa kurang baiknya kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa, karena adanya beberapa faktor, salah satunya yakni adanya ketidakpuasan dari hasil telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, ada masyarakat yang menginginkan didirikannya WC umum tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa di Desa Langgea Indah .

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah segala aktifitas dan aspek yang menyangkut keberhasilan pembangunan desa, maka aspek administrasi pemerintahan desa juga harus berjalan dengan baik agar perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Agar dapat mengetahui peran dari administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik maka pada tabel 9 dikemukakan pernyataan tentang peran pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam pembangunan Desa Langgea Indah sebagai berikut :

Tabel 9. Pernyataan Responden Tentang bagaimana Peran Pelaksana Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa

No.	Pernyataan	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	10	33,30
2	Cukup Baik	17	56,70
3	Kurang Baik	3	10,00
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 17 orang (56,70%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa sudah cukup baik, hal ini terlihat dalam proses administrasi pemerintahan desa sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa, meskipun masih terdapat beberapa kendala, 10 orang (33,30%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa sudah baik, sedangkan 3 orang (10,00%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa masih kurang baik.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berhasil, hal ini disebabkan karena tidak semua peran perencana dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berjalan dan dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya, karena terdapat beberapa hambatan baik materiil maupun immateriil. Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa masih ada sebagian kecil dari warga masyarakat desa yang kurang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pengawasan

Tujuan dari pada pengawasan ini sebagai langkah konkret dari kegiatan yang perlu diambil agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan dilakukan perbaikan apabila didalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari tujuan sebelumnya serta dapat berhasil dengan baik. Adapun kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan, inspeksi, dan berbagai tindakan lain yang dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang

telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan itu sendiri yakni :

- a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan dapat berdaya guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b) Agar hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat dan kesimpulan dan sasaran dari berbagai kebijakan perencanaan pembangunan.
- c) Untuk mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang dan uang milik negara, serta menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah.

Berdasarkan atas penjelasan diatas mengenai pengawasan maka penulis telah mengadakan wawancara singkat dengan aparat pemerintah Desa Langgea Indah dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan subsidi desa.

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan keterangan bahwa keuangan desa yang diperoleh dari subsidi desa mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh aparat pengawasan terbatas pada pelaporan, artinya pemerintah desa hanya memberikan informasi laporan kepada camat kemudian kepada bupati dan gubernur sampai kepada meteri dalam negeri mengenai realisasi pelaksanaan pembangunan. Selama ini belum ada pengecekan yang terjun langsung oleh aparat pengawasan fungsional (inspektorat wilayah daerah kabupaten).

Berdasarkan pula dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dipandang dari aspek pengawasan Desa Langgea Indah dinilai belum terlaksana secara efektif dan konsisten. Hal ini terlihat dari antara lain, tingginya frekwensi pelaksanaan konsultasi teknis menandakan banyaknya masalah yang dihadapi di lapangan.

Tidak adanya pengawasan langsung ini maka dapat dikatakan bahwa selalu terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini sebenarnya dapat dicegah bila saja sistem pengawasan oleh masyarakat berjalan efektif, dalam artian masyarakat ikut dalam pengawasan kegiatan pembangunan di daerah mereka.

Hal tersebut dapat terwujud apabila fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, namun ddalam kenyataan di Desa Langgea Indah lembaga pemberdayaan masyarakat ini belum sepenuhnya berperan aktif. Sebagian besar rencana desa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, sedangkan pengawasan sepenuhnya berada ditangan kepala desa.

c. Fungsi Bidang Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan mempunyai fungsi dan tugas yang begitu penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Tertib administrasi ketatausahaan perlu diperbaiki agar tercapai sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, maka keterampilan dan keahlian dari para aparat desa untuk dapat menyelenggarakan tugas ketatausahaan dengan sempurna.

Tugas dari tatausaha ini yaitu mencakup segala bentuk kegiatan masalah registrasi, catat mencatat, menyimpan dokumen dan surat-surat penting lainnya, menerima dan mengirim informasi dari berbagai keterangan.

Tabel 10. Pernyataan Responden Tentang bagaimana Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketatausahaan dalam Kegiatan Registrasi di Lingkup Pemerintahan Desa

No.	Pernyataan	Frekwensi	Persentase (%)
1	Efektif	3	10,00
2	Cukup Efektif	10	33,30
3	Kurang Efektif	17	56,70
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2018

Data tabel 10 di atas, menunjukkan dari 30 orang responden 17 orang mengatakan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di bidang ketatausahaan belum baik, hal ini terlihat pada proses administrasi bidang ketatausahaan pelaksanaan kegiatan registrasinya belum efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana, seperti lemari, komputer, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan tata ruang kantor. 10 orang menyatakan bahwa peran pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di bidang ketatausahaan sudah cukup baik sedangkan 3 orang menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca

pembangunan desa di bidang ketatausahaan sudah efektif.

Hasil dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi ketatausahaan di Desa Langgea Indah belum berjalan sebagaimana mestinya dalam kelancaran dalam proses pembangunan. Kurang efektifnya tugas-tugas ketatausahaan di Desa Langgea Indah dilihat pada pengisian buku registrasi, yang diisi kurang rapi dan teratur serta tidak akurat dalam memberikan informasi keadaan wilayah, data-data monografi desa tidak lengkap serta belum sesuai dengan pendataan data-data penduduk.

Karena faktor inilah yang menyebabkan kurangnya efektifnya penyelenggaraan fungsi dan tugas tatausaha ini, sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di desa Langgea Indah, inilah yang menyebabkan proses pembangunan memerlukan persediaan data yang akurat sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan.

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa dari hasil identifikasi kebutuhan dan kepentingan serta potensi masyarakat Desa Langgea Indah kemudian data tersebut diajukan oleh LPM dalam bentuk rancangan kemudian dibahas dalam musyawarah pembangunan desa.

Faktor-faktor yang mendorong Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dimaksudkan adalah sebagai faktor yang strategis yang memungkinkan berhasilnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan desa tergantung pada intensitas daya dukung seperti :

a. Tersedianya perangkat aturan

Perangkat aturan memegang peranan penting dan strategis sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi. Hal ini dapat dipahami karena adanya perangkat aturan yang memuat secara jelas dan sistematis mengenai metode dan prosedur memungkinkan penyelenggaraan administrasi dapat terlaksanakan dengan baik

b. Faktor Kelembagaan

Penyelenggaraan administrasi sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dan terprogram berjalan efektif apabila didukung oleh tersedianya lembaga sebagai sarana strategis dalam melaksanakan kegiatan dan ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dimaksud adalah faktor yang sifatnya menghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dalam upaya menciptakan iklim kerja. Hasil pengamatan penulis terhadap pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu:

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran aparat

Kesadaran aparat sangat menentukan tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi kerja, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan untuk mentaati dan mematuhi aturan dalam arti melaksanakan apa yang diwajibkan dan menghindari apa yang dilarang. Hasil penelitian bahwa baik atasan maupun bawahan masih ada memiliki tingkat kesadaran rendah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

2) Pelaksanaan koordinasi belum optimal

Hasil analisis penulis terhadap berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme administrasi di lingkungan kantor Desa Langgea Indah menampakkan bahwa faktor lain yang menyebabkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat adalah belum terkoordinasi secara optimal fungsi administrasi, hal itu dapat dilihat :

a) Belum terciptanya kesamaan pandang antara kepala desa dengan perangkat desa terhadap sistem, metode, prosedur pelayanan sehingga masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri.

b) Belum diterapkannya manajemen administrasi pemerintahan desa secara profesional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada bidang pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Hal itu dapat dilihat pada aspek mekanisme pelayanan administrasi pembangunan maupun dari aspek ketatausahaan dalam proses pembangunan.
 - a. Aspek pelayanan, khusus bidang informasi dan administratif dinilai belum terlaksana secara efektif disebabkan karena faktor rendahnya tingkat layanan informasi baik secara formal maupun informal yang diberikan oleh aparat desa kepada masyarakat.
 - b. Fungsi operasional administrasi pembangunan pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal itu terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam menghadiri rapat di desa, dalam proses perencanaan dan pembangunan. Lemahnya penyusunan anggaran pembangunan, khususnya anggaran pendapatan dan pengeluaran desa, karena pelaksanaannya masih didominasi oleh aparat desa bersama pengurus LPM dan tidak adanya pengawasan secara langsung.
 - c. Fungsi ketatausahaan atau fungsi registrasi belum efektif, dilihat dari kurangnya tertibnya pengisian buku registrasi dan tidak tersedianya pada struktur dan informasi yang akurat di balai desa.
2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di Desa Langgea Indah .
 - a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis.
 - b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa.
 - c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

E. Referensi

- Barata, I. N. (1982) *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Dasar-dasar penelitian Kualitatif, terjemahan oleh A. Khozim Afnadi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bowman, P.J. (1984). *Ilmu masyarakat dan Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadippemomo (1989), *Tata Personalialia*. Jakarta: Djambatan.
- Handayaningrat, S. (1985). *Adminsitrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kuwo, J. R. (1999). *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Malaranggeng, A., dkk., (2001). *Otonomi Daerah Dalam Profek Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Brigaf Publisng.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manullang. (1979), *Pembangunan Pengawal*. Bandung: Alumni.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategis Untuk Organisasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Salusu, J. (1996), *Dimensi Aparatur Dalam Pembangunan*. Jakarta: LAN RI.
- Saputra, S. (1981). *Pengaruh Teknologi dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: LBI.
- Siagian, S. P. (1982). *Ogranisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Slamet, I. E. (1965) *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Baratha.



Effectiveness of Village Government: Study at Onewila Village Office, Ranomeeto District South Konawe Regency

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Haeruddin ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
haersituru@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Abdul Nashar
Universitas Sulawesi Tenggara
abdulnashar99@yahoo.com

St. Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara
sjawiah7@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Haeruddin, Nashar, A., & Jawiah, S. (2022). Effectiveness of Village Government: Study at Onewila Village Office, Ranomeeto District South Konawe Regency. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 31-36.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data; menggunakan Model Interaktif. Hasil penelitian; menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan terkait Fokus Penelitian, yaitu; Indikator Produksi, Efisiensi, Dan Adaptasi/ Fleksibilitas telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi: a. Hendaknya kualitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan perangkatnya perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau penataran. b. Hendaknya Sumber pendapatan keuangan Pemerintah Desa seperti Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lain seperti Dana Desa lebih dioptimalkan. c. Hendaknya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang cukup memadai. D. Hendaknya Fasilitas kerja disediakan secara memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat desa.

Kata Kunci: Efektifitas, Pemerintahan Desa, Desa Onewila .

Abstract

The purpose of the study was to determine the effectiveness of the administration of Onewila Village, Ranomeeto District, South Konawe Regency. The research method is using descriptive research with a qualitative approach. Data analysis technique; using the Interactive Model. Research result; shows that the effectiveness of the administration of Onewila Village Government, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency is related to the Research Focus, namely; Production, Efficiency, and Adaptation/Flexibility indicators have been running well but still need to be improved. Recommendations: a. The quality of the Village Head's Human Resources and equipment should be improved through training or upgrading. b. The Village Government's sources of financial income, such as the Allocation of Village Funds and other sources of income such as the Village Fund, should be optimized. c. The Village Head and Village Apparatus should be given a steady income and adequate allowances. D. Work facilities should be provided adequately for the smooth implementation of village apparatus duties.

Keywords: Effectiveness, Village Government, Onewila Village.

A. Introduction

Normative phenomenon since 2014 where Villages and Village Government are regulated by their own laws, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages and their implementation is regulated in Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 About Village. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages, Villages or what are called by other names are legal community units that have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Administration is the administration of government affairs and the interests of the local community in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The implementation of village governance effectively is still one of the problems that can be found in many villages in Indonesia, including in Onewila Village, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency. One of the main problems is the problem of the low quality of village government human resources. Village government apparatus generally have inadequate education, lack of adequate knowledge, skills and skills in managing the administration of Village Government effectively. This condition is exacerbated by a lack of experience. Another problem in the Implementation of Village Government in Onewila Village, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency is the inadequate infrastructure and supporting facilities, such as: the condition of the village head's office is not representative enough to carry out village government administration effectively, office facilities and equipment are still very minimal, and other supporting facilities implementation of tasks is still very limited.

In addition to these two problems, another problem is that village financial resources to finance the administration of village government are still very limited in Onewila Village, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency. The sources of Village Income stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages article 72, namely: Village Original Income, Village Fund Allocation (DD), share of regional tax results and regional levies, Village Fund Allocation (ADD) which is part of the balancing fund, financial assistance from the Provincial and Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budgets, grants and non-binding donations from third parties; this has not been fully realized as it should be, so that the village government does not have sufficient funds or budget to finance the implementation of village government.

Based on the description of the problems mentioned above, the researchers are interested in conducting research with the title "Effectiveness of Village Administration (Study at the Onewila Village Office, Ranomeeto District, South Konawe Regency).

The Concept of Effectiveness

a. Definition of Effectiveness

The word effective comes from English, namely effective which means successful or something that is done successfully. Popular scientific dictionaries define effectiveness as the proper use, use or support of goals. Effectiveness is the main element to achieve the goals or targets that have been determined in each organization, activity or program. Called effective if the goal or target is achieved as determined. (Rosalina, 2012). Meanwhile, according to the Big Indonesian Dictionary of the Ministry of Education and Culture, (2000), effectiveness is defined as something that has an effect (consequently, has an effect), and can bring results, is effective (action) and can also mean comes into effect (regarding laws/regulations). The term effectiveness comes from the basic word effective (effective) which means: a. there are effects (influence, effect, effect) such as: effective; efficacious; works; and b. The use of methods / methods, facilities / tools in carrying out activities so that they are effective (achieve optimal results).

Efforts to evaluate the course of an organization, can be done through the concept of effectiveness. This concept is one of the factors to determine whether it is necessary to make significant changes to the form and management of the organization or not. In this case, effectiveness is the achievement of organizational goals through the efficient use of available resources, in terms of inputs, processes, and outputs. In this case, what is meant by resources includes the availability of personnel, facilities and infrastructure as well as the methods and models used. An activity is said to be efficient if it is carried out correctly and in accordance with procedures, while it is said to be effective if the activity is carried out correctly and provides useful results. (Iga Rosalina, 2012). So an organizational activity is said to be effective if an organizational activity runs according to the rules or runs according to the targets set by the organization.

b. Effectiveness Measure

Measures of Effectiveness Measuring the effectiveness of an activity program is not a very simple matter, because effectiveness can be studied from various perspectives and depends on who is assessing and interpreting it. When viewed from the point of view of productivity, a production manager provides an understanding that effectiveness means the quality and quantity (output) of goods and services. The level of effectiveness can also be measured by comparing the plans that have been determined with the actual results that have been realized. However, if the effort or the results of the work and actions taken are not appropriate, so that the goals are not achieved or the expected goals, then it is said to be ineffective. (Rosalina, 2012).

Concept of Effectiveness of Village Administration

As stated above, village government administration is a series of activities for structuring a group of people (village government apparatus/devices) to achieve village government goals. In other words, village government administration is the activities of the village government in carrying out the duties and functions of village government. Therefore, the effectiveness of village administration can be seen from the extent to which the success of the village government in achieving the goals set in relation to its duties and functions.

B. Methodology

Approach and Type of Research

This study uses a qualitative approach, namely the research method used to examine the condition of natural objects (natural setting) where the researcher is the key instrument and emphasizes meaning rather than generalizations. This type of research is descriptive, which is a research that describes and provides data as accurately as possible about the object under study according to the research focus. According to Bogdan and Taylor in Moleong (2006) qualitative method is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Williams in Moleong (2006) writes that qualitative research is collecting data in a natural setting, using natural methods, and carried out by naturally interested people or researchers. Qualitative research uses a naturalistic approach to seek and find understanding or understanding of phenomena in a special contextual setting. Moleong, (2006).

Research Locations And Sites

The research site is located in the administrative area of Onewila Village Government, Ranomeeto District, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, while the Research Site is at the Onewila Village Office, Ranomeeto District, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province.

Research Focus

The effectiveness of the implementation of Village Government is observed from 3 (three) effectiveness indicators, namely: production or results, efficiency, and adaptation/flexibility, namely:

- a. Production, namely the achievement or realization of village government programs and activities planned for each budget year;
- b. Efficiency, namely the appropriate use of organizational resources, especially human resources and costs in achieving the realization of planned/defined village government programs and activities.
- c. Adaptation or flexibility, namely the ability of the village government in responding to the development of tasks/work or in dealing with/handling problems that arise.

Research Informants

Consists of: a. Village head ; b. Village secretary; c. Heads of Affairs and d. At the Section Head; d. Regional heads (hamlet heads).

Data Collection Techniques

The data collection techniques in question are as follows: a. Observation; b. Interview; c. Documentation.

Data Analysis Techniques

The data analysis technique used is an interactive analysis model, from Miles and Huberman as quoted by Sugiyono (2010) which is applied through three paths, as shown in Figure 3.1 as follows:

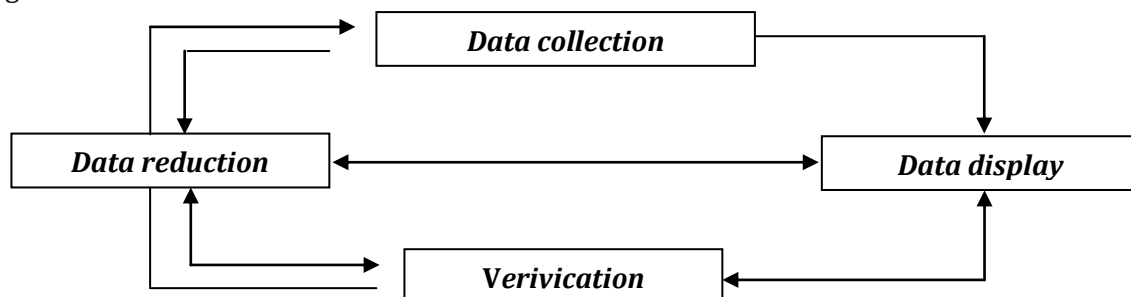


Figure 3.1 Milles and Huberman's interactive model

Data Validity Technique

Using triangulation techniques, namely checking data from various sources in various ways, and at various times. The triangulation technique used is source triangulation. Source triangulation technique is done by checking the data that has been obtained from various sources.

C. Finding and Discussion

The effectiveness of the implementation of Village Government is observed from 3 (three) effectiveness indicators, namely: production or results, efficiency, and adaptation/flexibility, namely: a. Production, namely the achievement or realization of village government programs and activities planned for each budget year; b. Efficiency, namely the appropriate use of organizational resources, especially human resources and costs in achieving the realization of planned/defined village government programs and activities. c. Adaptation or flexibility, namely the ability of the village government in responding to the development of tasks/work or in dealing with/handling problems that arise.

Production

Production indicators look at the achievement or realization of village government programs and activities planned for each budget year. That is, the effectiveness of village administration is seen from the success of the village government in implementing and realizing the programs and activities that have been determined in the field of village administration, the implementation of village development, the field of community development, and the field of village community empowerment.

The results showed: a. Village government program/activity plans in the field of village administration, development implementation, community development, and community empowerment are set out in the RKP-Desa in each fiscal year determined in village meetings. b. Implementation and realization or achievement of program results in the field of village administration has been running quite well but not optimally. c. Implementation and realization or achievement of program results in the field of village development has not been maximized. d. Programs in the field of community development have not been fully implemented. e. Programs in the field of village community empowerment have been running quite well, but still need to be maximized so that the results achieved are in line with the expectations of the local community.

The results showed that the effectiveness of the administration of Onewila Village, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency for production indicators was less than optimal. This condition occurs due to various factors. Based on the confession of the village head and other informants interviewed that the productivity of the village administration was not maximal, it was due to the low quality of human resources of village officials, the village government's funds/finances were still minimal, and work facilities were still inadequate.

Efficiency

The concept of efficiency implies a ratio or comparison between output and input, or between results and the resources used to achieve these results. In this study, the efficiency indicator is intended to use the appropriate use of organizational resources owned by the village government, especially human resources, costs, work facilities to achieve the realization of the planned village government programs and activities, then set to be implemented.

The results showed: a. The use of village apparatus human resources for the implementation of village government programs/activities has been running quite well but is still not optimal. Village officials have not been fully concentrated in carrying out their duties because they are still carrying out other work. b. The use of village government funds/finance is still not fully in accordance with what has been determined in the Village Budget. c. The use of work facilities has not been efficient because the existing work facilities are very limited and inadequate. The overall results of the study can show the effectiveness of the administration of Onewila Village, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency, seen from the efficiency indicators, it seems that it has been running quite well but is still not optimal.

The aspect that needs to be underlined from the results of this study is that the use of village human resources is not optimal. Based on the acknowledgment from the village head and also the village apparatus that this situation occurred because the village apparatus were not fully concentrated on their duties because they still had to divide their time to carry out the work/business which was their main source of income. They did this because there was no fixed salary as village officials, while the allowances they received were felt to be very small/low.

Adaptability/flexibility

Indicators of organizational effectiveness adaptation/flexibility the degree to which the organization can respond to internal and external changes. This indicator relates to management's ability to predict changes in the external environment as well as within the organization's own internal environment. Gibson, Ivancevich, & Konopaske (2011). In this study, adaptation/flexibility is seen from the ability of the village government in responding to the development of tasks/jobs or in dealing with and dealing with problems that arise in the community.

The results showed: a. The adaptive capacity of the village government in dealing with increased tasks is still low but has been implemented quite well. b. Certain assignments from the central/provincial/district government can be carried out by the village government well but the results are often less than optimal. c. The village government is also quite responsive to developments or problems that arise in the community. The handling or resolution of problems and problems that arise in the community has been handled quite well.

The findings of this study indicate that the effectiveness of the administration of Onewila Village Government, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency seen from the adaptation/flexibility indicators is still low. The low capacity for adaptation/flexibility is caused mainly by the low capacity of village apparatus resources. Village government officials need to improve the quality of human resources of the Onewila Village apparatus, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency to improve the ability to adapt in the administration of village governance.

D. Conclusion and Suggestions

Conclusion

- a. The effectiveness of the administration of Onewila Village Government, Ranomeeto District, South Konawe Regency seen from the "production" indicator has been running well. The realization of village government programs/activities stipulated in the field of governance, development, community development, and community empowerment is generally going well but not optimally.
- b. The effectiveness of the administration of Onewila Village Government, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency seen from the "efficiency" indicator has been implemented quite well. The use of village apparatus organizational resources, funds/finances, and work facilities) has been carried out quite well but the realization of the implementation of village government programs and activities has not been maximized.
- c. The effectiveness of the administration of Onewila Village, Ranomeeto District, Konawe Selatan Regency, seen from the indicators of the adaptability/flexibility of the village government has been running well. Changes or improvements in tasks and problems that arise in the community have been handled quite well but still need to be maximized.

Recommendations

- a. The quality of the Village Head's Human Resources and equipment should be improved through training or upgrading.
- b. The Village Government's sources of financial income, such as Village Fund Allocations and other sources of income such as Village Funds, should be optimized.
- c. The Village Head and Village Apparatus should be given a steady income and adequate allowances.
- d. Adequate work facilities should be provided for the smooth implementation of village apparatus tasks.

E. References

- Gibson, J., Ivancevich, J., & Konopaske, R. (2011). *Organizations: Behavior, structure, processes*. McGraw-Hill Higher Education.
- Government Regulation Number 43 of 2014. (2014). *concerning Implementing Regulations of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 About Village*
- Keban, Y. T. (2008). *Six Strategic Dimensions of public administration: concepts, theories and Issues*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana, I. (2003). *Indonesian Government Leadership*. Yogyakarta: Rafika Aditama.
- Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014. (2014). *About Village*.
- Moleong, L. J. (2006). *Qualitative Research Methodology*, Bandung: PT. Rosdakarya Youth.
- Rohidi R. C., & Mulyarto. (2002). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI-Press.
- Rosalina, I. (2012). The Effectiveness of the National Program for Urban Independent Community Empowerment in Revolving Loan Groups in Mantren Village, Karangrejo District, Madetaan Regency. *Journal of Community Empowerment Effectiveness*, 1(1), p. 3
- Siagian, S. P. (2000). *Administrative Philosophy*. Jakarta: Mount Agung.
- Sugiono. (2006). *Research Methods Quantitative, Qualitative and R & D*. Bandung: Alfabeta Approaches.
- , 2010. *Educational Research Methods (Quantitative and Qualitative Approaches and R&D)*. Bandung: ALFABETA.
- Tjokroamidjojo, B. (2002). *Introduction to Development Administration*. Jakarta: LP3ES.



Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
(AJSH)

Website: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com



Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Joko Tri Brata ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
joko_tribrata@yahoo.co.id <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
+6281245629964

Asri Djauhar
Universitas Sulawesi Tenggara
asridjauhar@gmail.com

Sufrianto
Universitas Sulawesi Tenggara
sufriantosaja@gmail.com

St. Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara
Sjawiah7@gmail.com

Ni Komang Esi Yuningsih
Universitas Sulawesi Tenggara
essi_saja@yahoo.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Brata, J. T., Djauhar, A., Sufrianto, Jawiah, S., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 37-46.

Abstrak

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan Khusus penelitian adalah mendeskripsikan partisipasi masyarakat dari aspek ; (1) masalah dan kebutuhan (2) peluang yang sama dalam perencanaan; (3) sinergitas perencanaan dan (4) Legalitas perencanaan. Metode Penelitian adalah dengan desain penelitian kualitatif menggunakan partisipan secara acak kepada mereka yang memenuhi kriteria sudah bermukim diatas 40 tahun, menggunakan metode observasi dan wawancara, sementara itu teknik analisa data dengan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masalah dan kebutuhan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang dimasyarakat. Berkaitan masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, dibutuhkan kerja keras Kepala Desa Alebo agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Berkaitan dengan Sinergitas perencanaan, belum dilakukan optimal, karena keterlibatan masyarakat belum terwakili. Berkaitan dengan indikator keempat yakni Legalitas perencanaan, sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah mengacu pada semua peraturan yang berlaku. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, maka untuk menyempurnakan perencanaan partisipatif, maka faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan upaya ; (1) Pendidikan melalui pelatihan, (2) meningkatkan Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan (3) meningkatkan Partisipasi aktif dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat ; perencanaan ; desa.

Abstract

Participation is taking part in an activity. Apart from being a key word in development, participation is also one of the characteristics of good governance. The general objective of the research is to describe the form of community participation in the planning and management process of development. The specific purpose of the research is to describe community participation from the aspects; (1) problems and needs (2) equal opportunities in planning; (3) planning synergy and (4) planning legality. Research method is a qualitative research design using random participants to those who meet the criteria for having lived above 40 years, using observation and interview methods, meanwhile the data analysis technique is triangulation. Results of the study show that problems and needs are carried out through investigation activities, exploring and collecting local problems and needs that develop in the community. With regard to the community having equal opportunities in planning, the Alebo Village Head's hard work is needed in order to foster public trust and increase community participation in the development planning process. With regard to planning synergies, it has not been carried out optimally, because community involvement has not been represented. Regarding the fourth indicator, namely the legality of planning, it is in accordance with existing regulations and can be accounted for, because it refers to all applicable regulations. Seeing the important and positive impact of participatory planning, to improve participatory planning, the community involvement factor can be increased by efforts; (1) Education through training, (2) increasing active participation in gathering information and (3) increasing active participation in providing alternative plans and proposals to the government.

Key Word: society participation ; planning; village.

A. Pendahuluan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi awal yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga- lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam kaitan dengan pembangunan, disebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama.

Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Dalam menelusuri Pendekatan '*community base management*', pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Dalam kaitan dengan pembangunan desa, bentuk partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana- rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Dengan gambaran tersebut, telaah dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa perencanaan yang partisipatif dapat meningkatkan minat masyarakat dan akan berdampak pada hasil pembangunan. Hal ini memperjelas bahwa proses yang baik akan metode partisipatif dalam kegiatan pembangunan. Olehnya itu, untuk membuktikan hasil temuan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji dari aspek ; (1) fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan (2) peluang yang sama dalam perencanaan; (3) sinergitas perencanaan dan (4) Legalitas perencanaan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan model perencanaan partisipatif dengan locus di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

B. Metode

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu bentuk penelitian yang menggunakan metode penalaran induktif dan percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang diungkapkan, serta berfokus pada fenomena sosial (Emzir, 2012).

2. Partisipan

Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang secara sengaja dipilih secara random (acak). Pemilihan partisipan didasari oleh berbagai pertimbangan, yaitu: (1) masyarakat Desa Alebo yang bermukim diatas 30 tahun karena dimanknai sangat faham akan kondisi lokasi penelitian; (2) aparat desa yang menjadi informan tambahan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti keaktifan masyarakat dalam melakukan dan aktif dalam mengikuti proses perencanaan di desanya. Adapun teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam tentang bagaimana keinginan yang baik dari masyarakat akan pentingnya proses perencanaan.

4. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah lembar pengamatan selama proses penelitian dan pedoman wawancara untuk menggali secara langsung informasi berkaitan dengan topik penelitian, khususnya pemahaman akan pentingnya perencanaan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan respons masyarakat dalam kegiatan perencanaan Selanjutnya menyajikan data dari hasil pengelompokan sesuai dengan topik penelitian. Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan dari hasil interpretasi setelah data disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Desa Alebo terletak kurang lebih 90 KM dari Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan atau kurang lebih 3 KM dari Ibu Kota Kecamatan Konda, Desa Alebo sebagian besar dihuni suku Jawa dan suku lain yang telah lama tinggal dan menetap.

Desa Alebo adalah desa ex transmigrasi tahun 1973, yang di pimpin oleh bapak Sutrisno Sebagai kepala Unit transmigrasi Dinas sosial dari Tahun 1975. Dari tahun 1975 – 1977 di jabat oleh Edi karabut sebagai kepala desa terpilih, Dari tahun 1977 s/d 1985 di jabat oleh Mulyo. Pada tahun 1985 s/d 1986 dijabat oleh Ibrahim Tawakal sebagai Pj kepala desa. tahun 1986 s/d 1992 kepala desa dijabat oleh Sanadi. Tahun 1992 s/d 1993 di jabat oleh Pj kepala desa yaitu Rustam tamburaka. Tahun 1993 s/d 2001 kepala desa di jabat oleh chasan rodhi. Tahun 2002 s/d 2003 dijabat oleh Ishaq sebagai pelaksana [Pj]. Tahun 2003 s/d 2007 kepala desa dijabat oleh Ginten. Tahun 2007 s/d 2022 dijabat oleh Pj kepala desa Ishaq. Tahun 2022 s/d 2014 kepala desa oleh Abdul Manaf Zani. Tahun 2014 Sampai 2016 Kepala Desa dijabat oleh Pelaksana Kepala Desa Ishaq. Tahun 2016 sampai sekarang kepala Desa dijabat oleh Kepala Desa Terpilih Abd. Manaf zani. Pada saat ini Desa Alebo terus memacu dalam mengejar ketertinggalannya dengan harapan dapat setara dengan desa lain yang terlebih dahulu ada di Kecamatan Konda.

Temuan penelitian berkaitan dengan (1) Fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan, dimana salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat local yang berkembang dimasyarakat.

Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap saat dan paling kurang satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam Desa Alebo, dimana dapat dicontohkan bahwa melalui mekanisme Ketua RT dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang. Sebelum penyeleksian masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan,

ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya. Pihak yang bertugas mereview adalah Ketua RT beserta perangkatnya. Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/rangking dan pengelompokkan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas dalam berbagai tingkatan tentunya dengan skala prioritas yang sesuai tingkatannya.

Dalam mendeskripsikan masalah kedua yaitu masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, maka dibutuhkan kerja keras Kepala Desa dalam mengupayakan kerja sama serta memperhatikan aspirasi masyarakatnya yang tentunya akan berbuah dukungan dari warga. Masyarakat dipersepsikan turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hubungan yang baik antara Kepala desa dan masyarakatnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disimpulkan bahwa untuk beberapa tema atau rencana pembangunan, perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Seperti dalam beberapa kesempatan, masyarakat belum merasakan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil aparat desa yang ada di Desa Alebo yang memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

Dalam kaitan dengan indikator ketiga yang berkaitan dengan Sinergitas perencanaan, yang berarti bahwa ada model partisipatoris dalam perencanaan pembangunan di Desa Alebo, temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

Untuk Desa Alebo, musrenbang selalu di lakukan setiap tahunnya. Walaupun sudah rutin dilakukan, namun dalam kenyataannya musrenbang Desa Alebo, belum dilakukan optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan Desa Alebo. Walaupun pandangan dari aparat desa Alebo menyatakan bahwa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat, yang dari setiap perwakilan desa itu ada 4 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, Tokoh masyarakat, dan PKK, dan nara sumber dari Kantor Kecamatan. (Wawancara tanggal 9 Maret 2022), tetapi berbanding terbalik dengan komentar dari masyarakat yang bukan peserta proses perencanaan pembangunan, dikatakan bahwa mereka mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan untuk apa proses tersebut dilaksanakan. Forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas di tingkat musyawarah desa, perwakilan masyarakat dalam forum-forum sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. (Wawancara tanggal 12 Maret 2022)

Dalam kaitan ini juga ditemukan jawaban bahwa Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata sangat ditekankan.

Di tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, misalnya dari APBN. Seperti program Alokasi Dana Desa yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Dana Desa yaitu program pembangunan yang sumber dananya dari pusat.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan, musrenbang dijadwalkan antara Februari-Maret yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan merupakan hasil

memaduserasikan antara prioritas usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan desa. Usulan yang terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan yang ada di Desa.

Berkaitan dengan indikator keempat yakni Legalitas perencanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Alebo sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan terkait yang ada dibawahnya.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak semua Desa menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya.

2. Pembahasan

Hasil penelitian sudah dideskripsikan mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan hasil perencanaan sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Untuk menganalisis hasil penelitian digunakan pendapat Wijaya (2001:16) sebagai acuan analisis yang mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

Pertama, Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Alebo dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi. Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif itu sendiri adalah: (1) Menentukan arah dan tujuan kegiatan perencanaan pembangunan oleh masyarakat, (2) Teridentifikasinya jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat dan (3) Teridentifikasinya rencana program masyarakat dalam pembangunan.

Hasil simpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya perencanaan partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat dan memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo.

Pada fase Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, memperlihatkan bahwa kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT sehingga diperoleh pokok masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian bentuk perencanaan lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan musbang dusun, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat. Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat pada beberapa perencanaan hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam beberapa perencanaan pembangunan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan dusun yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa.

Kedua, Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan kegiatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan ditemukan masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor: (1) Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan, (2) Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan –usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi., (3) Terbatasnya jumlah aparat dan kader pembangunan yang bertugas mengkomunikasikan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat dan (4). Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan. Rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif.

Ketiga, sinergitas perencanaan dalam konteks menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo, proses pengambilan keputusan yang diselenggarakan di tingkat Desa dan Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewakili unsur masyarakat di Desa Alebo, terlebih dalam proses perencanaan kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah, tetapi dari unsur keterwakilan wilayah ditemukan sudah baik, karena semua desa mempunyai wakil dalam musrenbang dan semua dusun terwakili dalam musyawarah desa.

Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan seperti: daftar prioritas permasalahan/kegiatan desa, dan daftar prioritas masalah di bawah desa. Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada umumnya, dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab Camat Konda, sementara itu tanggung jawab perencanaan di Desa Alebo merupakan tanggung jawab Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa Alebo. Dalam petunjuk teknis disebutkan bahwa perencanaan partisipatif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan keluaran. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Alebo dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat dilihat dari: (1) ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan; (2) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan; (3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang, karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses perencanaan pembangunan dijadwalkan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Alebo Kecamatan Konda masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah

satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

Geddesian (dalam Soemarmo, 2005: 26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana, begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Alebo, ada beberapa faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan upaya :

1. Pendidikan melalui pelatihan

Pendidikan melalui pelatihan untuk masyarakat Desa Alebo belum dilakukan secara menyeluruh, pendidikan mengenai perencanaan pembangunan hanya diberikan kepada kader yaitu sejumlah orang sebagai wakil dari setiap desa. Peran kader pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak mampu mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas.

2. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kecamatan Desa Alebo, hanya sebagian kecil desa yang melaksanakannya, sehingga perlu dilakukan pengumpulan informasi secara kontinyu (terus menerus) baik itu informasi formal maupun informasi pelengkap yang akan dipakai pada saat dilakukan perencanaan.

3. Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah, meskipun alternative rencana dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan.

Menurut Alexander Abe (2002: 91-92) ada dua bentuk perencanaan partisipatif, yaitu; **Pertama**, perencanaan yang langsung disusun bersama masyarakat, perencanaan ini bisa merupakan: (a) perencanaan lokasi-setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada; (b) perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan. **Kedua**, perencanaan disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk yang kedua ini, masyarakat sebaiknya masih tetap terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Jika dilihat dari proses perencanaan partisipatif dalam rangka proses perencanaan pembangunan di Desa Alebo, maka yang dilaksanakan merupakan bentuk pertama, dimana perencanaan disusun langsung oleh bersama masyarakat, walaupun untuk sebagian kasus ada beberapa perencanaan desa masih belum melibatkan masyarakat semua lapisan dalam proses perencanaan pembangunan terlebih dalam proses identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang disusun bersama masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Menurut Alexander Abe (2002), untuk mengorganisasi perencanaan model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni: (a) Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama, (b) Prinsip ini secara keseluruhan belum dilaksanakan di Desa Alebo Kecamatan Konda, yaitu pelaksanaan rembug RT, dimana peserta yang hadir adalah orang yang biasa dikenal sehari-hari dalam lingkungan RT. Sehingga perasaan saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama tentunya ada. (c) Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan, kesetaraan menjadi penting. Poin ini sudah dilaksanakan dengan baik di Desa Ale Kecamatan Konda. (d) Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (mereka peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat.

Hal ini belum ditunjukkan dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Alebo Kecamatan Konda, dimana masih ada praktek perang intelektual, sehingga penetapan hasil musrenbang dilakukan secara sepihak oleh kecamatan tanpa melibatkan

peserta, dimana (a) Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta atau kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi ; (b) berproses berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berpikir yang obyektif dan (c) prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.

Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Desa Alebo Kecamatan Konda, prinsip dasar di atas belum dikembangkan, mengingat beberapa keterbatasan akan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses perencanaan pembangunan.

Salah satu yang dapat juga direkomendasikan adalah dengan menggunakan model jaringan yang disebutkan oleh Tri Brata (2019;10) dengan menganalogi keuntungan model jaringan yang menekankan pada spesialisasi, inovasi, kecepatan, fleksibilitas dan jangkauan. Dimana dalam konsep ini menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan haruslah ada kolaborasi disemua unit dan jaringan yang ada. Analogi ini merepleksikan bahwa dalam sebuah perencanaan, dibutuhkan kolaborasi atau bahasa lain kerjasama antar para pihak.

D. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan yang partisipatif selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris "*participation*"

Perencanaan yang partisipatif adalah perencanaan yang didalamnya memuat (1) Fokus perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, (2) Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, (3) Sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders dan haruslah legal, karena (4) Legalitas perencanaan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat serta tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada, dimana pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

E. Referensi

- Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Bob, S. H. (2009). *Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Brata, J. T., Bariun, L. O., & Djauhar, A. (2019). Poverty Reduction through Slum Program Collaboration in Kendari City. *Iosrjournals*, 24(9): 08-15, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
- CESS. (2003) *Program Antikemiskinan di Indonesia, Pemetaan Informasi dan Kegiatan*. Jakarta: Center for Economics and Social Studies
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Conyers, D., & Hills, P. (1992). *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan sons. New york Hasibuan,
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Faturochman, et. al. (2007). *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Moelyarto. (1995). *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Michael, T. (1977). *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Milles, M. B., & Hubberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*. Jakarta: UI Percetakan.
- Royat, S. (2008), *Sistem Pengelolaan Informasi*, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Jakarta: Mandiri.
- Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2: 312
- Siagian, S. P. (1994). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soemarmo. (2005). Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik), *Tesis: Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sumarto, Sudarno, Usman, S., & Mawardi, S. (1997). *Agriculture's Role in Poverty Reduction: Bringing Farmers to the Policy Fomulation Process. [Peran Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan: Melibatkan Petani ke dalam Proses Perumusan Kebijakan]*. Agriculture Sector Strategy Review. Jakarta: Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia
- Soekartawi. (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: dengan pokok bahasan khusus perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tjokroamidjojo. (1989). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung. Tjokrowinoto, TKPK (2007) *Panduan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Versi Desember 2007. Jakarta: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Undang-undang No. 25. (2004). *tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional*.
- Wijaya, R. (2001). Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (*Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta*). *Tesis: Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dala Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2). ISSN. 2442-6962.